



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan kondisi lingkungan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);  
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional yang memuat kebijakan pelabuhan perikanan nasional dan rencana lokasi pelabuhan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian pelabuhan perikanan.

KEEMPAT : Rencana lokasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi acuan dalam sistem perizinan, statistik perikanan, dan sistem pendataan lain yang terkait.

KELIMA : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Mariani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejumlah 16.671 (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 (enam koma empat) juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) juta km<sup>2</sup>, luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 (tiga koma sebelas) juta km<sup>2</sup>, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 3,00 (tiga koma nol nol) juta km<sup>2</sup>. Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) juta km<sup>2</sup>, luas landas kontinen 2,8 (dua koma delapan) juta km<sup>2</sup>, dan panjang garis pantai 108.000 (seratus delapan ribu) km (Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018).

Dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian nasional, pembangunan perikanan harus mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025, bahwa pembangunan yang berkelanjutan dilakukan untuk mendorong perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah dengan didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, pelabuhan perikanan menjadi salah satu isu penting dalam hal pemenuhan kapasitas sarana prasarana kelautan dan perikanan. Selain itu, isu pelabuhan perikanan lainnya adalah integrasi pelabuhan

perikanan dan *fish market* bertaraf internasional, serta pentingnya pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan ekonomi biru (*blue economy*).

Pembangunan perikanan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pelabuhan perikanan. Hal ini dikarenakan, pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Dengan demikian, keberadaan pelabuhan perikanan juga mendukung *Sustainable Development Goals* 14 dalam melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, pelabuhan perikanan memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu:

1. fungsi pemerintahan, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan; dan
2. fungsi perusahaan, merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.

Apabila kedua fungsi tersebut sudah berjalan dengan baik, maka pelabuhan perikanan akan berdaya guna sebagai pusat ekonomi dan industrialisasi kelautan dan perikanan yang tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mewujudkan pelabuhan perikanan yang dapat melaksanakan kedua fungsi dimaksud dan menunjang aktivitas usaha di bidang perikanan diperlukan suatu pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan pelabuhan perikanan yang terencana,

baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah (badan usaha milik negara atau swasta), dengan memperhatikan daya dukung sumber daya ikan di masing-masing wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarwilayah dan antar para pihak baik pemerintah dan/atau pemerintah daerah maupun pihak badan usaha milik negara atau swasta.

Perencanaan yang terintegrasi sangat terkait erat dengan pemanfaatan ruang sebagaimana telah diamanahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mengamanahkan bahwa rencana lokasi pelabuhan perikanan nasional perlu mempertimbangkan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan/atau rencana zonasi kawasan antarwilayah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengamanahkan perlunya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha sesuai Pasal 101 yaitu berupa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan untuk di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Adapun kegiatan untuk nonberusaha sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu berupa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan untuk di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berupa Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengamanatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

## B. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPPN adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, pelabuhan yang sudah ada dan rencana lokasi pelabuhan perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan secara nasional.
2. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
3. Calon Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat CP adalah lokasi yang menjadi rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan, atau sentra nelayan yang akan dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan.
4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di kawasan antarwilayah.
7. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di kawasan strategis nasional tertentu.
8. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan

bagian daratan dan perairan yang menjadi Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.

9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

#### C. Tinjauan Perubahan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Peninjauan kembali RIPPN dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1. perubahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pelabuhan perikanan;
2. perubahan kebijakan nasional yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024;
3. perkembangan dokumen perencanaan kewilayahan di daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, meliputi rencana tata ruang wilayah provinsi;
4. perkembangan kondisi sumber daya ikan di WPPNRI; dan
5. rencana strategis lain terkait rencana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta perubahan lingkungan strategis secara global.

Hal-hal tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan peninjauan perubahan atas beberapa substansi RIPPN. Peninjauan perubahan dimaksud difokuskan pada beberapa aspek, yaitu:

1. rencana lokasi, yang memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang, RZ KSNT, dan/atau RZ KAW;
  - b. potensi sumber daya ikan;



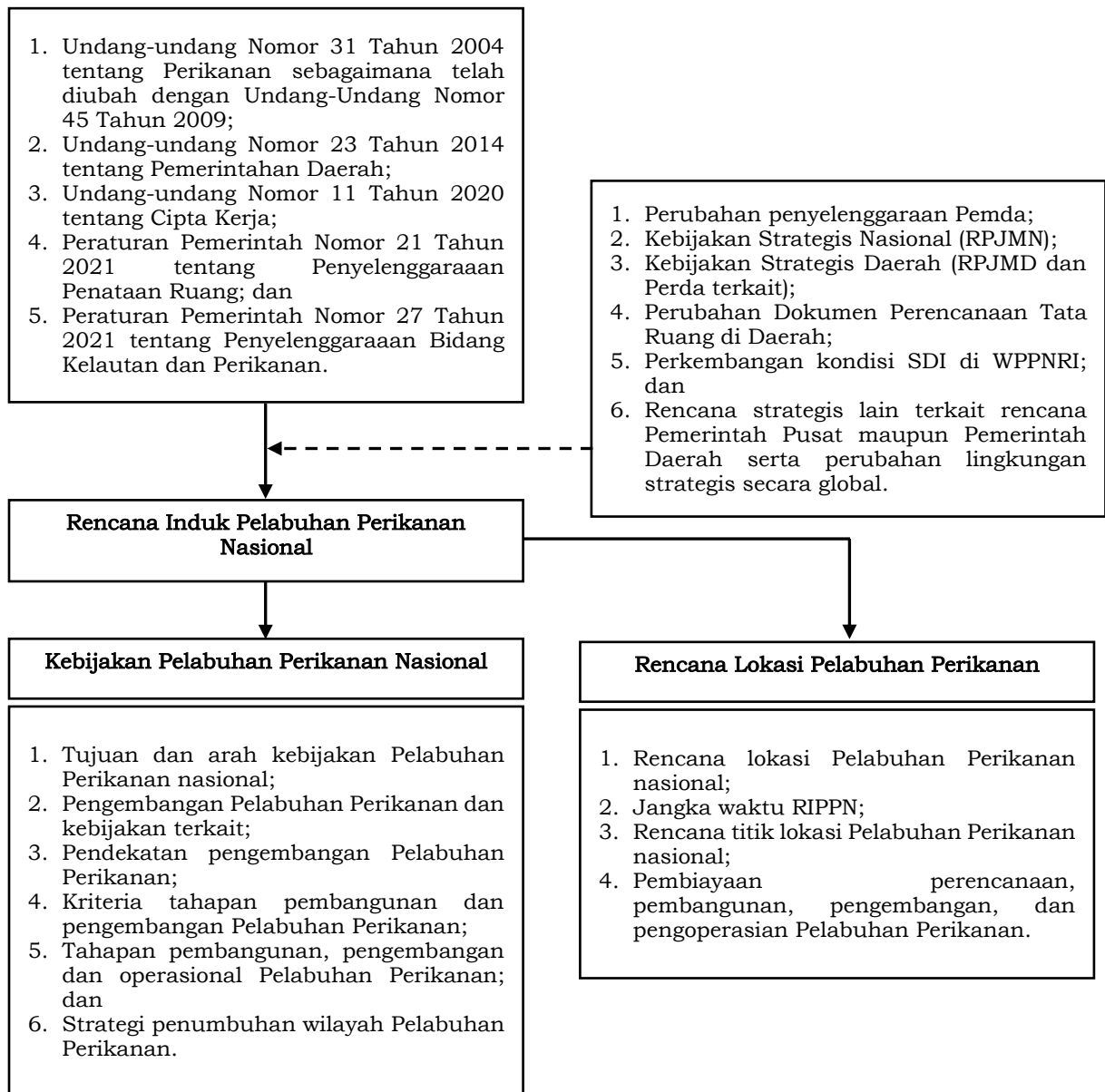
- c. WPPNRI;
  - d. ketersediaan prasarana wilayah;
  - e. geografis daerah dan kondisi perairan; dan
  - f. sosial ekonomi masyarakat.
2. rencana pembangunan dan/atau pengembangan, yang memperhatikan 5 (lima) tahap, yang terdiri 1 (satu) tahap pembangunan dan 4 (empat) tahap pengembangan;
  3. kriteria, yang memperhatikan masing-masing 5 (lima) tahap pembangunan dan/atau pengembangan;
  4. keterkaitan antar tahapan, yang memperhatikan semua tahapan saling berkaitan (*interrelated phases*); dan
  5. keterkaitan antar Pelabuhan Perikanan dalam satu wilayah.

RIPPN secara garis besar ditetapkan untuk mengakomodir berbagai aspek terkait rencana kebijakan Pelabuhan Perikanan nasional yang diharapkan mampu mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan, dengan beberapa batasan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. RIPPN merupakan pedoman yang berisi kriteria serta tahapan dan strategi penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
2. RIPPN merupakan kebijakan untuk perencanaan Pelabuhan Perikanan jangka panjang, yang melibatkan peran serta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, publik, dan sektor swasta bagi pembangunan pelabuhan baru maupun pengembangan pelabuhan yang sudah ada;
3. RIPPN menjadi landasan utama untuk perencanaan investasi jangka panjang, dimana sasarannya tidak hanya pembangunan fisik infrastruktur, namun juga mengatur tentang peningkatan operasional Pelabuhan Perikanan; dan
4. RIPPN merupakan *masterplan* dalam pengembangan ekonomi yang dapat dijadikan bagian oleh Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun rencana induk Pelabuhan Perikanan daerah dan kementerian/lembaga lainnya maupun unit kerja terkait di lingkungan Kementerian.

#### D. Kebijakan Pelabuhan Perikanan Nasional dan Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan

Kebijakan Pelabuhan Perikanan nasional memuat tujuan dan arah kebijakan Pelabuhan Perikanan nasional, pengembangan Pelabuhan Perikanan dan kebijakan terkait, pendekatan pengembangan Pelabuhan Perikanan, kriteria pengembangan Pelabuhan Perikanan, tahapan pembangunan, pengembangan, dan operasional Pelabuhan Perikanan, dan strategi penumbuhan wilayah Pelabuhan Perikanan. Selain itu, kebijakan Pelabuhan Perikanan nasional juga menjadi dasar atau pedoman dalam menetapkan rencana lokasi Pelabuhan Perikanan yang akan dibangun atau dikembangkan. Alur pikir dan substansi RIPPN dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pikir dan Substansi RIPPN

## BAB II

### KEBIJAKAN PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL

#### A. Tujuan dan Arah Kebijakan Pelabuhan Perikanan Nasional

Berdasarkan telaah lingkungan strategis, tujuan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan nasional adalah “Mewujudkan Pelabuhan Perikanan unggul sebagai penggerak ekonomi wilayah, berdaya saing global, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan yang memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya”.

Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan yang merupakan sintesa dari berbagai faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Lingkungan Strategis

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p><b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelabuhan Perikanan sebagai pusat aktifitas ekonomi perikanan;</li> <li>2. Jumlah Pelabuhan Perikanan yang relatif banyak;</li> <li>3. Beberapa Pelabuhan Perikanan telah menerapkan prinsip pengelolaan perikanan yang baik;</li> <li>4. Pembangunan Pelabuhan Perikanan merupakan amanat peraturan perundang undangan; dan</li> <li>5. Pelabuhan Perikanan memberikan dampak pengganda yang relatif besar terhadap ekonomi wilayah.</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebaran lokasi Pelabuhan Perikanan yang belum merata;</li> <li>2. Sumber daya manusia pengelola Pelabuhan Perikanan yang relatif terbatas;</li> <li>3. Sistem informasi Pelabuhan Perikanan yang belum optimal; dan</li> <li>4. Konektifitas belum berjalan dengan baik</li> <li>5. Masih terdapat Pelabuhan Perikanan yang belum operasional.</li> </ol>
	<p><b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang pemanfaatan sumber daya ikan masih relatif besar;</li> <li>2. Dukungan pemerintah dalam membangun Pelabuhan Perikanan yang berwawasan ekonomi biru (<i>blue economy</i>);</li> <li>3. Dukungan pemerintah dalam mengintegrasikan Pelabuhan Perikanan dengan pasar internasional;</li> <li>4. Peluang pasar dunia untuk komoditas perikanan masih relatif besar;</li> <li>5. Tingkat konsumsi ikan dalam negeri terus mengalami peningkatan; dan</li> <li>6. Potensi pengembangan industri perikanan dan industri penunjang</li> </ol>	<p><b>Strategi (<i>Strength-Opportunity</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab;</li> <li>2. Menggerakkan pertumbuhan ekonomi perikanan;</li> <li>3. Mengintegrasikan kegiatan perikanan nasional dan internasional; dan</li> <li>4. Pengembangan industri pengolahan di Pelabuhan Perikanan.</li> </ol>

perikanan yang relatif besar di Pelabuhan Perikanan.		
Ancaman ( <i>Threat</i> )	Strategi ( <i>Strength -Threat</i> )	Strategi ( <i>Weakness-Threat</i> )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negara tujuan pemasaran produk perikanan Indonesia semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>health, quality, and safety assurance</i>);</li> <li>2. Isu lingkungan dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan;</li> <li>3. perubahan pada tataran aturan perundangan-undangan berimplikasi pada kejelasan kepemilikan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan di daerah;</li> <li>4. Pendapatan pelaku perikanan masih belum maksimal; dan</li> <li>5. Konflik pemanfaatan ruang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan daya saing produk perikanan;</li> <li>2. Mengembangkan Pelabuhan Perikanan berwawasan ekonomi biru (<i>blue economy</i>);</li> <li>3. Mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan; dan</li> <li>4. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun keterpaduan pembiayaan pembangunan; dan</li> <li>2. Membangun konektivitas antar Pelabuhan Perikanan.</li> </ol>

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka arah kebijakan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan ke depan adalah sebagai berikut:

1. memfasilitasi perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab:  
Pelabuhan Perikanan berperan penting dalam pencatatan data dan informasi perikanan yang akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan.
2. menggerakkan pertumbuhan ekonomi perikanan:  
Pelabuhan Perikanan merupakan pusat integrasi antara penangkapan, pemasaran, pengolahan hingga distribusi hasil perikanan.
3. mengintegrasikan kegiatan perikanan nasional dan internasional:  
Pelabuhan Perikanan merupakan pintu masuk dan keluar transportasi antar moda dalam pengangkutan hasil perikanan, sehingga mengintegrasikan kegiatan perikanan nasional dengan pasar internasional menjadi sangat penting.
4. memfasilitasi pelayanan dasar kepelabuhanan dan pengembangan ekonomi:  
pembangunan ekonomi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur, oleh karena itu penyediaan dan pengembangan infrastruktur Pelabuhan Perikanan diharapkan mampu mendukung pengembangan ekonomi nasional di sektor perikanan.
5. mewujudkan tata kelola Pelabuhan Perikanan yang baik:  
pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang efektif dan efisien didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang profesional, kelembagaan yang kuat, dan sistem informasi yang handal.
6. pengembangan industri perikanan dan industri yang menunjang kegiatan perikanan:  
Pelabuhan Perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan perlu didukung oleh pengembangan industri perikanan dan industri yang menunjang kegiatan perikanan sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
7. pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan yang merata dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan:  
Pelabuhan Perikanan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah melalui pembangunan Pelabuhan

Perikanan yang terintegrasi khususnya di wilayah Indonesia timur, wilayah tertinggal, dan terluar.

8. mendukung pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu dan lembaga pengelola perikanan:

Pelabuhan Perikanan dapat berperan dalam pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu dan lembaga pengelola perikanan.

9. meningkatkan daya saing produk perikanan:

Pelabuhan Perikanan berperan penting dalam mendukung peningkatan daya saing produk perikanan yang akan diangkut dan diperdagangkan ke pasar internasional, sehingga infrastruktur Pelabuhan Perikanan diharapkan mampu mendukung standarisasi kualitas dan ketelusuran produk, dan penerapan prinsip perikanan yang baik.

10. mengembangkan Pelabuhan Perikanan berwawasan ekonomi biru (*blue economy*):

pembangunan Pelabuhan Perikanan yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan, yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga prinsip-prinsip ekonomi biru (*blue economy*) menjadi pedoman dalam setiap pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan.

11. mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan:

kegiatan usaha perikanan di Pelabuhan Perikanan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui peningkatan dan pemberdayaan usaha perikanan.

12. mengintegrasikan perencanaan pembangunan:

pembangunan Pelabuhan Perikanan harus mengintegrasikan dan menyelaraskan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti rencana tata ruang, RZ KAW, dan RZ KSNT.

13. membangun keterpaduan pembiayaan pembangunan:

kerja sama pembiayaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dengan instansi/kementerian terkait, Pemerintah Daerah dan swasta.

14. membangun konektivitas antar Pelabuhan Perikanan:

membangun sistem konektivitas Pelabuhan Perikanan untuk mendukung distribusi dan logistik perikanan yang efektif dan efisien, dan mengoptimalkan keterhubungan Pelabuhan Perikanan utama dengan Pelabuhan Perikanan pendukung.

## B. Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Kebijakan Terkait

Kebijakan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan, yaitu antara lain:

1. Kebijakan Sistem Logistik Ikan Nasional:

Sistem Logistik Ikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional, memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir, dan pemasaran secara efisien, dan meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan, dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai dengan hilir. Berdasarkan tujuan Sistem Logistik Ikan Nasional tersebut, Pelabuhan Perikanan menjadi konektor antara usaha penangkapan dengan usaha pengolahan serta pemasaran ikan.

2. Kebijakan Perencanaan Spasial:

Pembangunan Pelabuhan Perikanan harus sesuai dengan kebijakan perencanaan di daerah, yang dalam hal ini rencana tata ruang wilayah provinsi. Hingga saat ini tercatat 28 (dua puluh delapan) provinsi sudah memiliki Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pentaan Ruang dalam Pasal 245, RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi:

Kebijakan-kebijakan pengembangan kawasan ekonomi yang terkait dengan dengan Pelabuhan Perikanan dalam mendukung program-program pemerintah yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

C. Pendekatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pengembangan Pelabuhan Perikanan dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: Pertama, pendekatan penumbuhan lokasi Pelabuhan Perikanan, merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan skala operasional Pelabuhan Perikanan. Kedua, pendekatan penumbuhan wilayah Pelabuhan Perikanan, merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan integrasi Pelabuhan Perikanan di suatu wilayah terutama wilayah pengelolaan perikanan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan pertumbuhan Pelabuhan Perikanan yaitu:



1. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan (letak geografis dan kondisi perairan, keunggulan kompetitif dan komparatif untuk sub sektor perikanan, sosial ekonomi (potensi masyarakat perikanan, usaha nelayan, potensi konflik);
2. keselarasan dengan rencana tata ruang;
3. wilayah pengelolaan perikanan (lokasi dan potensi sumber daya ikan);
4. keselarasan dengan rencana pengembangan infrastruktur kementerian/lembaga pendukung (dukungan prasarana wilayah);
5. kebutuhan pengembangan fasilitas;
6. kebutuhan operasional; dan
7. jumlah sumber daya manusia.

Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan pertumbuhan wilayah Pelabuhan Perikanan adalah:

1. kecukupan jumlah Pelabuhan Perikanan di suatu wilayah;
2. sistem konektivitas dan hierarki Pelabuhan Perikanan di suatu wilayah; dan
3. dampak pengganda (*multiplier effect*) Pelabuhan Perikanan bagi wilayah.

D. Kriteria Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Tahapan pembangunan Pelabuhan Perikanan diarahkan untuk penyiapan CP, dengan kriteria sebagai berikut:

1. calon lokasi Pelabuhan Perikanan telah tercantum dalam RIPPN;
2. ketersediaan lahan dan kejelasan status kepemilikannya;
3. calon lokasi Pelabuhan Perikanan sesuai dengan perencanaan daerah dan/atau dokumen resmi lainnya;
4. adanya dokumen terkait perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan (studi kelayakan, persetujuan atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan, rencana induk pelabuhan perikanan, desain rinci, dan dokumen lingkungan hidup);
5. penyiapan minimal fasilitas Pelabuhan Perikanan yang meliputi:
  - a. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan;
  - b. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik; dan
  - c. fasilitas penunjang yaitu mandi cuci kakus;

6. adanya komitmen daerah dalam penyiapan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola;
7. adanya komitmen daerah untuk pendanaan operasional dan pengembangan;
8. adanya dukungan prasarana wilayah (prasarana jalan, listrik, air, dan telekomunikasi); dan
9. adanya rencana induk pengembangan Pelabuhan Perikanan tingkat Daerah.

Tahapan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Perikanan yang telah memenuhi fasilitas dasar Pelabuhan Perikanan, dengan kriteria sebagai berikut:

1. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan;
2. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik; dan
3. fasilitas penunjang yaitu mandi cuci kakus.

Sedangkan tahapan pengembangan Pelabuhan Perikanan terdiri atas 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria teknis dan kriteria operasional Pelabuhan Perikanan. Kriteria-kriteria ini menjadi acuan dalam mengarahkan pengembangan untuk mencapai masing-masing tahapan. Kriteria teknis dan kriteria operasional sebagai berikut:

1. Kriteria PPI:
  - a. Kriteria teknis terdiri atas:
    - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
    - 2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
    - 3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
    - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) *gross tonnage*; dan
    - 5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare.

- b. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari.
2. Kriteria PPP:
    - a. Kriteria teknis terdiri atas:
      - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
      - 2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran paling kecil 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
      - 3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 100 (seratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 2 (dua) meter;
      - 4) mampu menampung kapal perikanan paling sedikit 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 (tiga ratus) *gross tonnage*; dan
      - 5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 5 (lima) hektare.
    - b. Kriteria operasional terdiri atas:
      - 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan
      - 2) terdapat industri pengolahan ikan dan/atau industri penunjang lainnya.
  3. Kriteria PPN:
    - a. Kriteria teknis terdiri atas:
      - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas;
      - 2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran paling kecil 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
      - 3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 150 (seratus lima puluh) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter;
      - 4) mampu menampung kapal perikanan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan paling

sedikit 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) *gross tonnage*; dan

5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektare.

b. Kriteria operasional terdiri atas:

1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 15 (lima belas) ton per hari; dan

2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

4. Kriteria PPS:

a. Kriteria teknis terdiri atas:

1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas;

2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran paling kecil 60 (enam puluh) *gross tonnage*;

3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 300 (tiga ratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter;

4) mampu menampung kapal perikanan paling sedikit 100 (seratus) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 6.000 (enam ribu) *gross tonnage*; dan

5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 20 (dua puluh) hektare.

b. Kriteria operasional terdiri atas:

1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;

2) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 (lima puluh) ton per hari; dan

3) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Selain kriteria teknis dan kriteria operasional Pelabuhan Perikanan tersebut terdapat aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan yaitu sumber daya manusia dan tata kelola, serta dampak penganda, sebagai berikut:

1. Pelabuhan Perikanan:

a. aspek sumber daya manusia dan tata kelola terdiri atas:

- 1) sumber daya manusia pengelola yang kebutuhannya disesuaikan dengan beban kerja pengelolaan tugas dan fungsi; dan
  - 2) nelayan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan.
  - b. aspek dampak pengganda yaitu penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.
2. PPI:
- a. aspek sumber daya manusia dan tata kelola terdiri atas:
    - 1) sumber daya manusia pengelola yang kebutuhannya disesuaikan dengan beban kerja pengelolaan tugas dan fungsi; dan
    - 2) nelayan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan.
  - b. aspek dampak pengganda yaitu penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.
3. PPP:
- a. aspek sumber daya manusia dan tata kelola terdiri atas:
    - 1) sumber daya manusia pengelola yang kebutuhannya disesuaikan dengan beban kerja pengelolaan tugas dan fungsi; dan
    - 2) nelayan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan.
  - b. aspek dampak pengganda yaitu penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.
4. PPN:
- a. aspek sumber daya manusia dan tata kelola terdiri atas:
    - 1) sumber daya manusia pengelola yang kebutuhannya disesuaikan dengan beban kerja pengelolaan tugas dan fungsi;
    - 2) nelayan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan; dan
    - 3) telah menggunakan sistem informasi terpadu dalam pelayanan kepelabuhanan.
  - b. aspek dampak pengganda yaitu penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.
5. PPS
- a. aspek sumber daya manusia dan tata kelola terdiri atas:
    - 1) sumber daya manusia pengelola yang kebutuhannya disesuaikan dengan beban kerja pengelolaan tugas dan fungsi;
    - 2) nelayan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan; dan

- 3) telah menggunakan sistem informasi terpadu dalam pelayanan kepelabuhanan.
- b. aspek dampak pengganda yaitu penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Kriteria Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Tahapan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI
<b>TUJUAN PENGEMBANGAN</b>	Penyiapan pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya fasilitas dasar Pelabuhan Perikanan	Terselenggaranya pelayanan dasar kepelabuhanan	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan dasar	Penumbuhan industri kepelabuhanan dan nilai tambah	Pengembangan industri perikanan terintegrasi dan berdaya saing global
<b>PROYEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN</b>	CP	PP	PPI	PPP	PPN	PPS
<b>KRITERIA</b>						
<b>I. Teknis</b>						
1. Jangkauan operasional kapal	1. Calon lokasi Pelabuhan Perikanan telah tercantum dalam RIPPN;	Memiliki fasilitas minimal Pelabuhan Perikanan meliputi:	perairan Indonesia dan ZEEI	perairan Indonesia dan ZEEI	perairan Indonesia, ZEEI, dan laut lepas	perairan Indonesia, ZEEI, dan laut lepas
2. Fasilitas tambat labuh	2. Ketersediaan lahan dan kejelasan status kepemilikannya;	1. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan;	Berukuran 10 (sepuluh) <i>gross tonnage</i>	Paling sedikit 10 (sepuluh) <i>gross tonnage</i>	Paling sedikit 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i>	Paling sedikit 60 (enam puluh) <i>gross tonnage</i>
3. Panjang dermaga dan kedalaman kolam pelabuhan	3. Calon lokasi Pelabuhan Perikanan sesuai dengan perencanaan daerah (ditunjukkan dengan dokumen resmi);	2. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik; dan	sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 (satu) m	sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 (dua) m	sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 (tiga) m;	sekurang-kurangnya 300 (delapan ratus) m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 (tiga) m
4. Daya tampung kolam pelabuhan	4. Adanya dokumen perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan (studi kelayakan, persetujuan atau konfirmasi	3. fasilitas penunjang yaitu mandi cuci kakus.	sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) <i>gross tonnage</i>	sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 (tiga ratus) <i>gross tonnage</i>	paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) <i>gross tonnage</i>	paling sedikit 100 (seratus) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 6.000 (enam ribu) <i>gross tonnage</i>
5. Luas lahan pelabuhan	perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan (studi kelayakan, persetujuan atau konfirmasi		Paling sedikit 1 (satu) ha	Paling sedikit 5 (lima) ha	Paling sedikit 10 (sepuluh) ha	Paling sedikit 20 (dua puluh) ha
<b>II. Operasional</b>	kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penetapan lokasi pembangunan pelabuhan					
Aktivitas bongkar muat			rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari.	rata-rata 5 (lima) ton per hari	rata-rata 15 (lima belas) ton per hari	rata-rata 50 (lima puluh) ton per hari
Aktivitas perbekalan melaut			Terdapat aktivitas penyediaan bahan	Terdapat aktivitas penyediaan bahan	Terdapat aktivitas penyediaan bahan	Terdapat aktivitas penyediaan bahan

Tahapan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI
	perikanan, rencana induk Pelabuhan Perikanan, desain rinci dan dokumen lingkungan hidup);		perbekalan melaut, seperti air, BBM dan es	perbekalan melaut, seperti air, BBM dan es	perbekalan melaut, seperti air, BBM dan es	perbekalan melaut, seperti air, BBM dan es
Aktivitas industri	5. Adanya komitmen daerah dalam penyiapan SDM dan kelembagaan pengelola;		Terdapat industri pengolahan tradisional	terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya	terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya	Terdapat kawasan industri perikanan terintegrasi
Aktivitas pemasaran	6. Adanya komitmen daerah untuk pendanaan operasional dan pengembangan;		Terdapat pemasaran ikan di sekitar Pelabuhan Perikanan	Terdapat pemasaran ikan ke luar daerah di dalam satu provinsi	terdapat pemasaran ikan antar provinsi	Terdapat pemasaran ikan tujuan ekspor
Aktivitas investasi	7. Adanya rencana induk pengembangan Pelabuhan Perikanan tingkat daerah; dan				terdapat <i>fish market</i> bertaraf nasional	Terdapat <i>fish market</i> bertaraf nasional dan/atau internasional
ASPEK	8. Adanya dukungan prasarana wilayah (prasarana jalan, listrik, air, dan telekomunikasi).		Terdapat investasi usaha dengan skala kecil dan menengah	Terdapat investasi usaha dengan skala kecil dan menengah	Terdapat investasi usaha dengan skala kecil, menengah, dan besar	Terdapat investasi usaha dengan skala kecil, menengah, dan besar
I. SDM dan Tata Kelola		SDM pengelola yang kebutuhannya disesuaikan dengan beban kerja pengelolaan tugas dan fungsi	SDM pengelola yang kebutuhannya disesuaikan dengan beban kerja pengelolaan tugas dan fungsi	SDM pengelola yang kebutuhannya disesuaikan dengan beban kerja pengelolaan tugas dan fungsi	SDM pengelola yang kebutuhannya disesuaikan dengan beban kerja pengelolaan tugas dan fungsi	SDM pengelola yang kebutuhannya disesuaikan dengan beban kerja pengelolaan tugas dan fungsi
		Nelayan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan	Nelayan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan	Nelayan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan	Nelayan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan	Nelayan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan
					Telah menggunakan sistem informasi terpadu dalam pelayanan kepelabuhanan	Telah menggunakan sistem informasi terpadu dalam pelayanan kepelabuhanan
II. Dampak Pengganda		Penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi	Penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi	Penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi	Penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi	Penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi
Strategi Pengembangan	1. Penyelesaian pengelolaan (status) aset yang <i>clean and clear</i> ; 2. Penyelarasan lokasi/calon lokasi Pelabuhan Perikanan di dalam dokumen rencana tata ruang, RZ	1. Pembangunan fasilitas dasar (minimum operasional) Pelabuhan Perikanan; 2. Pembentukan lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan; dan	1. Peningkatan fasilitas dasar (minimum operasional) Pelabuhan Perikanan; 2. Penetapan kelas Pelabuhan Perikanan; 3. Penugasan personil;	1. Peningkatan kapasitas dan atau pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan; 2. Peningkatan penataan perizinan kapal perikanan; dan 3. Peningkatan pelaksanaan	1. Peningkatan kapasitas dan atau pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan; 2. Pengembangan fasilitas untuk mendukung konektivitas antar Pelabuhan Perikanan sub-hub dan hub	1. Peningkatan kapasitas dan atau pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan; 2. Pengembangan fasilitas untuk mendukung konektivitas antar Pelabuhan Perikanan hubungan dengan



Tahapan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI
	<p>KSNT, dan/atau RZ KAW;</p> <p>3. Penyelarasan dukungan K/L/Eselon I lain lingkup KKP dalam penyediaan infrastruktur pendukung (akses jalan, rencana penyiapan air bersih, ketersediaan listrik, akses terhadap BBM, pabrik es, pasar ikan, dll);</p> <p>4. Penyiapan dokumen terkait perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan;</p> <p>5. Penyiapan permohonan KKRL/PKKPRL;</p> <p>6. Penyiapan sumberdaya manusia (analisis beban kerja dan komitmen daerah untuk mempersiapkan SDM pengelola); dan</p> <p>7. Penyiapan pendanaan rencana pengembangan dan operasional awal Pelabuhan Perikanan.</p>	<p>3. Pelaksanaan operasional kapal perikanan.</p>	<p>4. Manajemen aset (pencatatan dan penghapusan);</p> <p>5. Penataan perizinan kapal perikanan; dan</p> <p>6. Pelaksanaan operasional kapal perikanan.</p>	<p>operasional kapal perikanan.</p>	<p>(distribusi dan logistik);</p> <p>3. Pengembangan sistem teknologi informasi online dalam pelayanan kepelabuhanan;</p> <p>4. Pengembangan fasilitas industri pengolahan dan industri terkait;</p> <p>5. Pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan;</p> <p>6. Pelaksanaan ketertelusuran hasil tangkapan ikan;</p> <p>7. Pengembangan fasilitas <i>fish market</i> berskala nasional; dan</p> <p>8. Operasional Pelabuhan Perikanan yang menerapkan prinsip ekonomi biru (<i>blue economy</i>).</p>	<p>pasar bertaraf internasional (distribusi dan logistik);</p> <p>3. Pemanfaatan sistem informasi <i>online</i> dalam pelayanan kepelabuhanan;</p> <p>4. Fasilitasi kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang berskala internasional;</p> <p>5. Pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan;</p> <p>6. Pengembangan fasilitas industri kepelabuhanan terintegrasi;</p> <p>7. Pengembangan fasilitas <i>fish market</i> berskala nasional dan/atau internasional; dan</p> <p>8. Memiliki akses terhadap penyelesaian administrasi ekspor yaitu dapat berupa (<i>health certificate</i>, karantina, bea cukai, perbankan, imigrasi, dll).</p>

E. Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Operasional Pelabuhan Perikanan

Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan bertujuan untuk mewujudkan Pelabuhan Perikanan yang unggul sebagai penggerak ekonomi wilayah, berdaya saing global, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan yang memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya.

Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah, menggunakan dua pendekatan strategi yaitu:

1. penumbuhan lokasi Pelabuhan Perikanan; dan
2. penumbuhan wilayah Pelabuhan Perikanan.

Penumbuhan lokasi Pelabuhan Perikanan dilakukan dalam 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Tahap I bertujuan untuk menyiapkan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan;
2. Tahap II bertujuan untuk menyediakan fasilitas dasar Pelabuhan Perikanan;
3. Tahap III bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar kepelabuhanan perikanan dengan target mencapai kelas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
4. Tahap IV bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepelabuhanan dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
5. Tahap V bertujuan untuk menumbuhkan industri perikanan dan industri yang menunjang kegiatan perikanan dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); dan
6. Tahap VI bertujuan untuk mengembangkan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing global dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan diselenggarakan oleh pemerintah atau bukan pemerintah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Dibangun oleh Pemerintah

Tahapan pembangunan dan pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik apabila memenuhi tahapan sebagai berikut:

a. Tahap I:

- 1) kesesuaian calon lokasi pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam RIPPN;
- 2) penyiapan calon lokasi yang dibuktikan dengan dokumen penguasaan dan/atau kepemilikan tanah;
- 3) kesesuaian dengan kebijakan rencana pembangunan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- 4) penyiapan dokumen terkait perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan (studi kelayakan, penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan, rencana induk Pelabuhan Perikanan, dan desain rinci);
- 5) penyiapan dokumen lingkungan hidup;
- 6) penyusunan peta rencana WKOPP; dan
- 7) strategi penyiapan pendanaan rencana pembangunan, sumberdaya manusia dan kelembagaan oleh penyelenggara Pelabuhan Perikanan.

b. Tahap II:

Tahap ini dirancang atau diproyeksikan untuk memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan, dengan strategi:

- 1) pembangunan fasilitas dasar (minimum operasional) Pelabuhan Perikanan;
- 2) pembentukan lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
- 3) pelaksanaan operasional kapal perikanan.

c. Tahap III:

Tahap ini dirancang atau diproyeksikan untuk memenuhi kriteria kelas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dengan strategi:

- 1) strategi pada Tahap II sudah dilaksanakan;
- 2) peningkatan fasilitas dasar (minimum operasional) Pelabuhan Perikanan;
- 3) pembangunan fasilitas pemasaran lokal;
- 4) pelayanan kesyahbandaran;
- 5) operasional kapal perikanan;
- 6) pelaksanaan pendataan;

- 7) pelaksanaan penyuluhan nelayan;
- 8) pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan standar pelayanan kepelabuhanan;
- 9) penyelesaian P3D (Personil, Prasarana, Pendanaan, dan Dokumen);
- 10) penetapan kelas pelabuhan;
- 11) pengelolaan aset dan penyelesaian status aset yang bermasalah;
- 12) penetapan WKOPP; dan
- 13) penyiapan dokumen perencanaan pengembangan dan penyiapan dokumen lingkungan hidup.

d. Tahap IV:

Tahap ini dirancang atau diproyeksikan untuk memenuhi kriteria kelas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dengan strategi:

- 1) strategi pada Tahap III sudah dilaksanakan;
- 2) pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan untuk meningkatkan skala ekonomi kepelabuhanan;
- 3) pengembangan fasilitas dan pembinaan usaha kecil dan menengah;
- 4) pengembangan fasilitas pemasaran domestik antar kabupaten dan pusat jajan ikan;
- 5) penyiapan manajemen mutu pelayanan kepelabuhanan;
- 6) pembinaan cara penanganan ikan yang baik di Pelabuhan Perikanan;
- 7) penyiapan pengelolaan berbasis manajemen mutu lingkungan;
- 8) pengembangan fasilitas untuk mendukung konektivitas antar Pelabuhan Perikanan sub-hub (*feeder* penunjang) dalam rangka distribusi dan logistik produk perikanan;
- 9) pendataan dan pelaporan sudah memanfaatkan sistem informasi kepelabuhanan perikanan;
- 10) ketertelusuran hasil tangkapan ikan (penerapan sertifikat hasil tangkapan ikan dan *log book* penangkapan ikan);
- 11) fasilitasi fungsi pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan/*IUU Fishing*; dan

- 12) penyusunan dokumen rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan dan penyiapan dokumen lingkungan hidup.

e. Tahap V:

Tahap ini dirancang atau diproyeksikan untuk memenuhi kriteria kelas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dengan strategi:

- 1) strategi pada Tahap IV sudah dilaksanakan;
- 2) pengembangan fasilitas dan pembinaan usaha menengah dan besar;
- 3) pengembangan fasilitas pemasaran domestik antar provinsi dan pusat jajan ikan;
- 4) penerapan manajemen mutu pelayanan pelabuhan;
- 5) pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan untuk penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- 6) penerapan ISO 14001 tentang pengelolaan lingkungan;
- 7) pengembangan fasilitas untuk mendukung konektivitas antar Pelabuhan Perikanan sub-hub (*feeder* utama) dalam rangka distribusi dan logistik produk perikanan;
- 8) pengembangan fasilitas wisata bahari berbasis kepelabuhanan;
- 9) persiapan layanan *online* dalam pelayanan pelabuhan;  
dan
- 10) penyusunan dokumen rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan yang mengadopsi teknologi terkini dan penyiapan dokumen lingkungan hidup.

f. Tahap VI:

Tahap ini dirancang atau diproyeksikan untuk memenuhi kriteria kelas Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), dengan strategi:

- 1) strategi pada Tahap V sudah dilaksanakan;
- 2) pembangunan dan pengembangan fasilitas berstandar internasional dan ekspor;
- 3) pengembangan fasilitas dan pembinaan usaha industri;
- 4) pengembangan fasilitas pemasaran internasional;
- 5) pengembangan pembinaan pelayanan pelabuhan berstandar internasional;
- 6) pengembangan fasilitas industri kepelabuhanan terintegrasi;

- 7) pengembangan fasilitas untuk mendukung konektivitas antar Pelabuhan Perikanan hub dengan pasar bertaraf internasional;
- 8) fasilitasi kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang berskala internasional;
- 9) fasilitasi akses terhadap penyelesaian administrasi ekspor; dan
- 10) penyusunan dokumen rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan yang mengadopsi teknologi terkini dan penyiapan dokumen lingkungan hidup.

Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dapat dilakukan secara tidak berurutan berdasarkan proyeksi pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kebijakan dan kemampuan penyelenggara Pelabuhan Perikanan.

2. Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah.

Kegiatan pembangunan dan pengembangan dan operasional Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah, diselenggarakan oleh pelaku usaha nonperseorangan (berbadan hukum).

Terdapat 3 (tiga) tahap dalam pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah yaitu Tahap I (Pembangunan) yang bertujuan untuk mempersiapkan pembangunan Pelabuhan Perikanan, yang berupa penyiapan seluruh dokumen administrasi pembangunan, Tahap II (Pembangunan dan Operasional) yang bertujuan untuk melaksanakan rencana pembangunan yang telah dipersiapkan, dan Tahap III (tahap pengembangan) yang bertujuan untuk meningkatkan skala operasional Pelabuhan Perikanan.

a. Tahap I (Pembangunan):

- 1) kesesuaian calon lokasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam RIPPN;
- 2) penyiapan calon lokasi yang dibuktikan dengan dokumen penguasaan dan/atau kepemilikan tanah;

- 3) kesesuaian dengan kebijakan rencana pembangunan Pemerintah Pusat;
  - 4) penyiapan dokumen terkait perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan (studi kelayakan, penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan, rencana induk Pelabuhan Perikanan, dan desain rinci);
  - 5) penyiapan dokumen lingkungan hidup;
  - 6) penyusunan peta rencana WKOPP;
  - 7) penyiapan perizinan (izin lingkungan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan lain-lain);
  - 8) penyiapan usulan permohonan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan;
  - 9) penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan oleh Menteri; dan
  - 10) strategi penyiapan pendanaan rencana pembangunan, sumberdaya manusia dan kelembagaan oleh penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
- b. Tahap II (Pembangunan dan Operasional):
- 1) strategi pada Tahap I sudah dilaksanakan;
  - 2) penyiapan izin mendirikan bangunan dan persyaratan pembangunan lainnya;
  - 3) pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan;
  - 4) menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam operasional Pelabuhan Perikanan;
  - 5) penyiapan sumber daya manusia, organisasi, dan kelembagaannya;
  - 6) penyiapan usulan pengoperasian, penetapan kelas, dan WKOPP;
  - 7) penetapan oleh pemerintah sebagai Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah dan WKOPP;
  - 8) melakukan kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan (melaksanakan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 9) pendataan dan pelaporan sudah memanfaatkan sistem informasi kepelabuhanan perikanan; dan

- 10) penyiapan dokumen perencanaan pengembangan dan penyiapan dokumen lingkungan hidup.
- c. Tahap III (Pengembangan):
- 1) strategi pada Tahap II sudah dilaksanakan;
  - 2) peningkatan operasional Pelabuhan Perikanan di luar dokumen perencanaan pembangunan pada Tahap I;
  - 3) penyiapan dokumen perencanaan pengembangan dan penyiapan dokumen lingkungan hidup; dan
  - 4) menyiapkan perizinan dan prosedur lainnya sesuai Tahap I dan Tahap II.

#### F. Strategi Penumbuhan Wilayah Pelabuhan Perikanan

Penumbuhan wilayah Pelabuhan Perikanan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan spasial yang ada terutama didasarkan pada sebaran berdasarkan WPPNRI dan potensi sumber daya ikannya serta membangun sinergi antar Pelabuhan Perikanan dalam suatu wilayah sehingga secara keseluruhan berdampak pada operasional yang efektif dan efisien yang memberikan dampak ekonomi wilayah yang signifikan. Tabel 3 menunjukkan hubungan antara jumlah Pelabuhan Perikanan saat ini dan potensi sumber daya ikan yang ada di masing masing WPPNRI.

Tabel 3. Jumlah Pelabuhan Perikanan saat ini dan Potensi Sumber Daya Ikan berdasarkan WPPNRI

WPPNRI	Jumlah Pelabuhan Perikanan	Potensi Sumber Daya Ikan (ton)
571	31	425.444
572	62	1.240.975
573	90	1.267.540
711	18	767.126
712	184	1.341.632
713	58	1.177.857
714	28	788.939
715	35	1.242.526
716	20	597.139
717	6	1.054.695
718	6	2.637.565
Jumlah	538	12.541.438

Sumber data: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional



Berdasarkan Tabel 3. di atas terlihat bahwa pembangunan Pelabuhan Perikanan baru dilakukan terutama pada wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya ikan yang relatif melimpah tapi keberadaan Pelabuhan Perikanan relatif sedikit. Pembangunan Pelabuhan Perikanan baru ini terutama di WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik) dan WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur). Wilayah Pengelolaan Perikanan yang mempunyai jumlah Pelabuhan Perikanan yang sudah relatif jenuh, maka pengembangan Pelabuhan Perikanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tingkat operasionalnya dan peningkatan kelas pelabuhannya.

Adapun strategi penumbuhan wilayah Pelabuhan Perikanan dalam rangka mewujudkan konektivitas antar Pelabuhan Perikanan meliputi:

1. pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan di wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya ikan, pemasaran ikan yang relatif besar termasuk didalamnya pengembangan Pelabuhan Perikanan di wilayah perbatasan negara;
2. pengembangan sistem informasi kepelabuhanan perikanan nasional;
3. sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan;
4. penyusunan rencana induk Pelabuhan Perikanan daerah sebagai implementasi dari RIPPN;
5. sinkronisasi dan koordinasi antar pemerintah dalam pembiayaan pembangunan Pelabuhan Perikanan dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang;
6. sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan Pelabuhan Perikanan; dan
7. sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan fasilitas komersial.

### BAB III

#### RENCANA LOKASI PELABUHAN PERIKANAN

##### A. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan Nasional

Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan di masa depan tidak terlepas dari lingkungan strategis yang akan mempengaruhinya baik lingkungan strategis internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman) kepelabuhanan perikanan.

Faktor kekuatan ini meliputi: Pertama, Pelabuhan Perikanan sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan. Kedua, jumlah Pelabuhan Perikanan yang relatif banyak dimana sampai saat ini terdapat 538 (lima ratus tiga puluh delapan) Pelabuhan Perikanan di perairan laut dan 54 (lima puluh empat) Pelabuhan Perikanan di perairan umum. Ketiga, Pelabuhan Perikanan terutama Pelabuhan Perikanan Kelas PPS dan PPN telah menerapkan prinsip pengelolaan yang baik. Keempat, pembangunan Pelabuhan Perikanan merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Pelabuhan Perikanan secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan pelaksanaannya. Kelima, Pelabuhan Perikanan memberikan dampak pengganda yang relatif besar terhadap ekonomi wilayah. Adanya aktivitas ekonomi di Pelabuhan Perikanan mendorong para pelaku perikanan untuk berusaha di wilayah Pelabuhan Perikanan ini. Usaha tersebut mencakup aktivitas praproduksi (penyediaan bahan perbekalan melaut, kapal, dan alat penangkapan ikan, produksi (penangkapan ikan), dan pasca produksi (pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan). Aktivitas tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Pelabuhan Perikanan dan wilayah sekitarnya.

Faktor kelemahan yang meliputi: Pertama, sebaran lokasi Pelabuhan Perikanan yang belum merata. Adanya ketimpangan penyebaran spasial Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan sebagian besar (69% (enam puluh sembilan persen)) berada di wilayah Indonesia bagian barat dan 31% (tiga puluh satu persen) berada di Indonesia bagian timur. Peluang pemanfaatan sumber daya ikan secara

nasional memang masih relatif besar yaitu 5,8 (lima koma delapan) juta ton/tahun. Namun demikian, peluang pemanfaatan tersebut terkonsentrasi pada wilayah perairan tertentu terutama di perairan Indonesia timur. Ketimpangan juga terlihat apabila Pelabuhan Perikanan dilihat berdasarkan sebaran wilayah pengelolaan perikanan sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Beberapa WPPNRI dengan jumlah Pelabuhan Perikanan yang relatif banyak terutama bila dikaitkan dengan potensi sumber daya ikannya adalah WPPNRI 511, WPPNRI 573, WPPNRI 711, dan WPPNRI 712. Sedangkan WPPNRI yang memiliki pelabuhan relatif sedikit adalah WPPNRI 717 dan WPPNRI 718. Kedua, sumber daya manusia pengelola Pelabuhan Perikanan yang relatif terbatas. Ketiga, sistem informasi Pelabuhan Perikanan yang belum optimal. Keempat, konektivitas belum berjalan dengan baik. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya sinergi antar Pelabuhan Perikanan dalam mendukung distribusi dan logistik ikan yang efektif dan efisien. Kelima, masih terdapat ketimpangan operasional dimana masih terdapat Pelabuhan Perikanan yang tidak operasional, operasional di bawah kapasitas, dan operasional melebihi kapasitasnya. Ketimpangan operasional ini berimplikasi pada ketidakefisienan dan kepuasan pelayanan kepelabuhanan. Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional yang melebihi kapasitas akan menyebabkan waktu pelayanan yang relatif lebih lama, misalnya terjadinya antrian kapal saat melakukan pembongkaran hasil tangkapan. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan biaya operasional pelaku perikanan tetapi juga dapat menurunkan kualitas hasil tangkapan. Demikian juga sebaliknya, Pelabuhan Perikanan yang tidak beroperasi akan menyebabkan adanya beban anggaran dan operasional pelabuhan tersebut.

Sedangkan lingkungan strategis eksternal kepelabuhanan perikanan adalah:

Faktor peluang, meliputi: Pertama, peluang pemanfaatan sumber daya ikan masih relatif besar. Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia mencapai 12.541.438 (dua belas juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan) ton dan baru dimanfaatkan sebesar 6.696.000 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu) ton atau 53% (lima puluh tiga persen). Artinya peluang pemanfaatan sumber daya ikan ini masih ada sebesar 5.845.438 (lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan) ton atau 47% (empat puluh tujuh persen). Kedua, dukungan pemerintah dalam

membangun Pelabuhan Perikanan yang menerapkan prinsip ekonomi biru (*blue economy*). Hal ini termaktub dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Ketiga, dukungan pemerintah dalam mengintegrasikan Pelabuhan Perikanan dengan pasar internasional. Hal ini termaktub dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Keempat, peluang pasar dunia untuk komoditas perikanan masih relatif besar. Kelima, tingkat konsumsi ikan dalam negeri terus mengalami peningkatan. Tingkat konsumsi ikan dalam negeri tahun 2017 mencapai 47,34 (empat puluh tujuh koma tiga empat) kg/kapita/tahun meningkat 7,23% (tujuh koma dua tiga persen) menjadi 50,69 (lima puluh koma enam sembilan) per kapita/tahun pada tahun 2018 (Laporan Tahunan Kementerian tahun 2018). Keenam, kapasitas industri produksi pengolahan ikan masih relatif rendah.

Faktor ancaman meliputi: Pertama, negara-negara tujuan pemasaran produk perikanan Indonesia semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*health, quality, and safety assurance*). Kedua, isu lingkungan dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Ketiga, perubahan pada tataran aturan perundangan-undangan berimplikasi pada kejelasan kepemilikan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan di daerah. Keempat, pendapatan pelaku perikanan masih belum maksimal. Pendapatan rata-rata nelayan pada tahun 2017 sebesar 2,7 (dua koma tujuh) juta/bulan (Laporan Tahunan Kementerian tahun 2017) sehingga hal ini masih perlu ditingkatkan kembali.

Pengembangan Pelabuhan Perikanan juga memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun sektor perikanan. rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 bidang ekonomi menekankan pada pencapaian visi terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa. Untuk mencapai visi ekonomi tersebut, maka arah pembangunan jangka panjang bidang ekonomi, diantaranya adalah:

1. perekonomian dikembangkan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan sosial;
2. peranan pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan;
3. daya saing global perekonomian perlu terus dikembangkan;
4. kebijaksanaan industri dikelola dengan pengembangan jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) yang sehat dan kompetitif, dalam rangka memperkuat daya saing global;
5. kebijakan industri perlu diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan dan investasi; dan
6. proses industrialisasi perlu mendorong peningkatan nilai tambah kegiatan sektor primer terutama pertanian dalam arti luas, dan pertambangan.

Sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025, beberapa agenda pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan, dan akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah, penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang, penguatan kemampuan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis keunggulan wilayah, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata, dan peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan
4. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020-2024 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 diantaranya adalah:

1. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan yang meliputi strategi:
  - a. menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), transformasi kelembagaan, dan fungsi WPPNRI, meningkatkan kualitas pengelolaan WPPNRI, serta pengelolaan dan penataan ruang laut, dan rencana zonasi pesisir;
  - b. mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan;
  - c. meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
  - d. meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi, dan pasar, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta
  - e. meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan, dan perikanan serta penguatan *database* kelautan dan perikanan.Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target *Sustainable Development Goals* 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*); dan
2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi perikanan. Peningkatan nilai tambah pada perikanan ini dilakukan melalui perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri pengolahan, hilirisasi industri rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah, penguatan daya saing unit pengolahan ikan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (*traceability*), penyediaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan berskala internasional, penguatan *branding* produk perikanan Indonesia, dan pengembangan sistem pemasaran produk perikanan berbasis digital.

Visi Kementerian 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan dicapai dengan misi:

1. peningkatan kualitas manusia indonesia, melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di Kementerian.

Berdasarkan identifikasi dan analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025, rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, dan usulan dari Pemerintah Daerah, maka disusun rencana titik lokasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

#### B. Jangka Waktu RIPPN

Jangka waktu RIPPN ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, RIPPN dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### C. Rencana Titik Lokasi Pelabuhan Perikanan Nasional

Rencana Titik Lokasi Pelabuhan Perikanan yang tercantum dalam RIPPN ini berjumlah 592 (lima ratus sembilan puluh dua) lokasi yang terdiri atas:

1. sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) lokasi Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh pemerintah dan melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut dengan rincian sebagaimana Tabel 4;
2. sebanyak 7 (tujuh) lokasi Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh pemerintah dan yang melayani kapal perikanan yang melakukan

kegiatan perikanan di wilayah perairan darat dengan rincian sebagaimana Tabel 5; dan

3. sebanyak 15 (lima belas) lokasi Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah dengan rincian sebagaimana Tabel 6.

Kelas Pelabuhan Perikanan saat ini terdiri atas:

3. PPS sebanyak 7 (tujuh) lokasi;
4. PPN sebanyak 18 (delapan belas) lokasi;
5. PPP sebanyak 42 (empat puluh dua) lokasi;
6. PPI sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lokasi;
7. PP sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lokasi; dan
8. CP sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lokasi.



Tabel 4. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Dibangun oleh Pemerintah dan Melayani Kapal Perikanan yang Melakukan Kegiatan Perikanan di Wilayah Laut, dan Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	571.11.01	Ie Meulee	Aceh	Kota Sabang	Sukajaya	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
2	571.11.02	Keuneukai	Aceh	Kota Sabang	Sukajaya	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
3	571.11.03	Lambada	Aceh	Kab. Aceh Besar	Baitussalam	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
4	571.11.04	Kuala Tari	Aceh	Kab. Pidie	Kembang Tanjong	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
5	571.11.05	Tgk. Dilaweung	Aceh	Kab. Pidie	Muara Tiga	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
6	571.11.06	Kuala Peukan Baro	Aceh	Kab. Pidie	Kota Sigli	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
7	571.11.07	Meureudu	Aceh	Kab. Pidie Jaya	Meureudu	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
8	571.11.08	Pante Raja	Aceh	Kab. Pidie Jaya	Panteraja	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
9	571.11.09	Peudada	Aceh	Kab. Bireuen	Peudada	PPI	PPI	PPI	PPP	PPN
10	571.11.10	Pusong	Aceh	Kota Lhokseumawe	Banda Sakti	PPI	PPI	PPI	PPP	PPN
11	571.11.11	Ujung Blang	Aceh	Kota Lhoksumawe	Banda Sakti	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
12	571.11.12	Krueng Mane	Aceh	Kab. Aceh Utara	Muara Batu	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
13	571.11.13	Kuala Cangkoy	Aceh	Kab. Aceh Utara	Lapang	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
14	571.11.14	Seuneubok Baroh	Aceh	Kab. Aceh Timur	Idi Cut	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
15	571.11.15	Idi	Aceh	Kab. Aceh Timur	Idi Rayeuk	PPN	PPN	PPN	PPN	PPS
16	572.11.16	Lampulo	Aceh	Kota Banda Aceh	Kuta Alam	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
17	572.11.17	Anak Laut	Aceh	Kab. Aceh Singkil	Singkil Utara	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
18	572.11.18	Ujong Baroeh	Aceh	Kab. Aceh barat	Johan Pahwalan	PPI	PPI	PPI	PPI	PPP
19	572.11.19	Kuala Tuha	Aceh	Kab. Nagan Raya	Kuala Pesisir	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
20	572.11.20	Ujung Serangga	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Susoh	PPI	PPI	PPI	PPI	PPP
21	572.11.21	Keude Meukek	Aceh	Kab. Aceh Selatan	Meukek	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
22	572.11.22	Lhok Bengkuang	Aceh	Kab. Aceh Selatan	Tapak Tuan	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
23	572.11.23	Labuhanhaji	Aceh	Kab. Aceh Selatan	Labuhanhaji	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
24	572.11.24	Sawang Ba'u	Aceh	Kab. Aceh Selatan	Sawang	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
25	572.11.25	Teluk Sinabang (Lugu)	Aceh	Kab. Simeulue	Simeulue Timur	PP	PPI	PPI	PPI	PPP

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/ PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
26	571.11.26	Kuala Langsa	Aceh	Kota Langsa	Langsa Barat	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
27	571.12.01	Pangkalan Susu	Sumatra Utara	Kab. Langkat	Pangkalan Susu	CP	PP	PP	PPI	PPI
28	571.12.02	Tanjung Balai Asahan	Sumatra Utara	Kab. Asahan	Tanjung Balai	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
29	571.12.03	Belawan	Sumatra Utara	Kota Medan	Medan Belawan	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
30	571.12.04	Pantai Labu	Sumatra Utara	Kab. Deli Serdang	Pantai Labu	CP	PP	PP	PPI	PPI
31	571.12.05	Tanjung Tiram	Sumatra Utara	Kab. Batubara	Tanjung Tiram	CP	PP	PP	PPI	PPI
32	572.12.06	Pulau Tello	Sumatra Utara	Kab. Nias Selatan	Pulau-Pulau Batu	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
33	572.12.07	Sibolga	Sumatra Utara	Kab. Tapanuli Tengah	Sarudik	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
34	572.12.08	Teluk Belukar	Sumatra Utara	Kab. Gunungsitoli	Gunungsitoli Utara	CP	PP	PP	PPI	PPI
35	572.12.09	Kalangan	Sumatra Utara	Kab. Tapanuli Tengah	Pandan	CP	PP	PP	PPI	PPI
36	572.12.10	Tuhemberua	Sumatra Utara	Kab. Nias Utara	Tuhemberua	CP	PP	PP	PPI	PPI
37	572.12.11	Lahewa	Sumatra Utara	Kab. Nias Utara	Lahewa	CP	PP	PP	PPI	PPI
38	572.13.01	Bungus	Sumatra Barat	Kota Padang	Bungus Teluk Kabung	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
39	572.13.02	Muaro Anai	Sumatra Barat	Kota Padang	Koto Tengah	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
40	572.13.03	Carocok Tarusan	Sumatra Barat	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	PPI	PPP	PPP	PPP	PPN
41	572.13.04	Batu Kalang	Sumatra Barat	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	CP	CP	CP	PPI	PPI
42	572.13.05	Kambang	Sumatra Barat	Kab. Pesisir Selatan	Lengayang	PPI	PPI	PPI	PPP	PPP
43	572.13.06	Surantih	Sumatra Barat	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
44	572.13.07	Muaro Jambu	Sumatra Barat	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Beganti	CP	CP	CP	PPI	PPI
45	572.13.08	Muaro Gadang	Sumatra Barat	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Beganti	CP	CP	CP	PPI	PPI
46	572.13.09	Batang Kapas	Sumatra Barat	Kab. Pesisir Selatan	Batang Kapas	CP	CP	CP	PPI	PPI
47	572.13.10	Api-api	Sumatra Barat	Kab. Pesisir Selatan	Bayang	CP	CP	CP	PPI	PPI
48	572.13.11	Tiku	Sumatra Barat	Kab. Agam	Tanjung Mutiara	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
49	572.13.12	Muaro Putuih	Sumatra Barat	Kab. Agam	Tanjung Mutiara	CP	CP	CP	PPI	PPI
50	572.13.13	Air Bangis	Sumatra Barat	Kab. Pasaman Barat	Sungai Beremas	PPI	PPI	PPI	PPP	PPP

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
51	572.13.14	Sasak	Sumatra Barat	Kab. Pasaman Barat	Sasak Ranah Pesisir	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
52	572.13.15	Pasir Sunur	Sumatra Barat	Kota Pariaman	Pariaman Selatan	CP	CP	CP	PPI	PPI
53	572.13.16	Anai Ketaping	Sumatra Barat	Kab. Padang Pariaman	Batang Anai	CP	CP	CP	PPI	PPI
54	572.13.17	Ulakan Tapakis	Sumatra Barat	Kab. Padang Pariaman	Ulakan Tapakis	CP	CP	CP	PPI	PPI
55	572.13.18	Gasan	Sumatra Barat	Kab. Padang Pariaman	Batang Gasan	CP	CP	CP	PPI	PPI
56	572.13.19	Pasir Baru	Sumatra Barat	Kab. Padang Pariaman	Sungai Limau	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
57	572.13.20	Sikakap	Sumatra Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	Sikakap	PPI	PPI	PPI	PPP	PPP
58	572.13.21	Muara Siberut	Sumatra Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Selatan	CP	CP	CP	PPI	PPI
59	571.14.01	Dumai	Riau	Kota Dumai	Dumai Barat	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
60	571.14.02	Bagan Siapiapi	Riau	Kab. Rokan Hilir	Bangko	CP	PP	PP	PPI	PPI
61	571.14.03	Panipahan	Riau	Kab. Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas	CP	PP	PP	PPI	PPI
62	571.14.04	Sinaboi	Riau	Kab. Rokan Hilir	Sinaboi	CP	PP	PP	PPI	PPI
63	571.14.05	Bengkalis	Riau	Kab. Bengkalis	Bengkalis	CP	PP	PP	PPI	PPI
64	571.14.06	Tanjung Medang	Riau	Kab. Bengkalis	Rupat Utara	CP	PP	PP	PPI	PPI
65	571.14.07	Selat Panjang	Riau	Kab. Kepulauan Meranti	Tebing Tinggi	CP	PP	PP	PPI	PPI
66	571.14.08	Tanjung Samak	Riau	Kab. Kepulauan Meranti	Rangsang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
67	711.14.09	Kuala Enok	Riau	Kab. Indragiri Hilir	Tanah Merah	CP	PP	PP	PPI	PPI
68	711.14.10	Sungai Guntung	Riau	Kab. Indragiri Hilir	Kateman	CP	PP	PP	PPI	PPI
69	711.15.01	Kuala Tungkal	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
70	711.15.02	Nipah Panjang	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Nipah Panjang	PP	PP	PP	PPI	PPI
71	711.15.03	Teluk Majelis	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Kuala Jambi	CP	PP	PP	PPI	PPI
72	711.16.01	Jakabaring	Sumatra Selatan	Kota Palembang	Seberang Ulu I	CP	PP	PP	PPI	PPI
73	711.16.02	Sungai Lumpur	Sumatra Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	Cengal	CP	PP	PP	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
74	711.16.03	Sungsang	Sumatra Selatan	Kab. Banyuasin	Banyu Asin II	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
75	572.17.01	Pasar Bantal	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Teramang Jaya	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
76	572.17.02	Pasar Lama	Bengkulu	Kab. Kaur	Kaur Selatan	PP	PP	PP	PPI	PPI
77	572.17.03	Pasar Bawah	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Pasar Manna	PP	PP	PP	PPI	PPI
78	572.17.04	Pondok Kelapa	Bengkulu	Kab. Bengkulu tengah	Pondok Kelapa	PP	PP	PP	PPI	PPI
79	572.17.05	Pasar Seluma	Bengkulu	Kab. Seluma	Seluma Selatan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
80	572.17.06	Pulau Baai	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kampung melayu	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
81	572.17.07	Air Napal	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Air Napal	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
82	712.18.01	Labuhan Maringgai	Lampung	Kab. Lampung Timur	Labuhan Maringgai	PPP	PPP	PPN	PPP	PPN
83	712.18.02	Kuala Penet	Lampung	Kab. Lampung Timur	Labuhan Maringgai	PPI	PPI	PPI	PPP	PPP
84	712.18.03	Teladas	Lampung	Kab. Tulangbawang	Tulangbawang	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
85	712.18.04	Ketapang	Lampung	Kab. Lampung Selatan	Ketapang	PPI	PPI	PPI	PPI	PPP
86	572.18.05	Kalianda	Lampung	Kab. Lampung Selatan	Kalianda	PPI	PPI	PPI	PPP	PPP
87	572.18.06	Rangai	Lampung	Kab. Lampung Selatan	Katibung	PPI	PPI	PPI	PPI	PPP
88	572.18.07	Muara Piluk Bakauheni	Lampung	Kab. Lampung Selatan	Bakauheni	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
89	572.18.08	Way Muli	Lampung	Kab. Lampung Selatan	Rajabasa	PP	PP	PP	PPI	PPI
90	572.18.09	Kramat	Lampung	Kab. Lampung Selatan	Ketapang	PP	PP	PP	PP	PP
91	572.18.10	Kunjir	Lampung	Kab. Lampung Selatan	Rajabasa	CP	PP	PP	PP	PP
92	572.18.11	Lempasing	Lampung	Kota Bandar Lampung	Telukbetung Timur	PPP	PPP	PPN	PPN	PPN
93	572.18.12	Kota Agung	Lampung	Kab. Tanggamus	Kota Agung	PPP	PPP	PPP	PPP	PPN
94	572.18.13	Tegineneng	Lampung	Kab. Tanggamus	Limau	CP	PP	PP	PPI	PPI
95	572.18.14	Penyandingan	Lampung	Kab. Tanggamus	Kelumbayan	CP	PP	PP	PPI	PPI
96	572.18.15	Bengkunat	Lampung	Kab. Pesisir Barat	Bengkunat	PP	PP	PP	PPN	PPN
97	572.18.16	Kuala Stabas Krui	Lampung	Kab. Pesisir Barat	Pesisir Tengah	PP	PP	PPI	PPI	PPI
98	572.18.17	Durian	Lampung	Kab. Pasawaran	Padang Cermin	PP	PP	PPI	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
99	711.19.01	Muara Sungai Baturusa	Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	Rangkui	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
100	711.19.02	Sungailiat	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka	Sungailiat	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
101	711.19.03	Kurau	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	Koba	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
102	711.19.04	Sungai Selan	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
103	711.19.05	Sadai	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	Tukak Sadai	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
104	711.19.06	Selat Nasik	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung	Selat Nasik	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
105	711.19.07	Tanjungpandan	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung	Tanjung Pandan	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
106	711.19.08	Munsang	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung	Sijuk	CP	PP	PP	PPI	PPI
107	711.19.09	Gantung	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	Gantung	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
108	711.19.10	Manggar	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	Manggar	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
109	711.21.01	Batu Duyung	Kepulauan Riau	Kab. Bintan	Bintan Timur	CP	PP	PP	PPI	PPI
110	711.21.02	Kijang Bintan	Kepulauan Riau	Kab. Bintan	Bintan Timur	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
111	711.21.03	Pering Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	Bunguran Timur	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
112	711.21.04	Selat Lampa	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	Bunguran Timur	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
113	711.21.05	Pulau Lumut	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	Karimun	CP	PP	PP	PPI	PPI
114	711.21.06	Moro	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	Moro	CP	PP	PP	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
115	711.21.07	Kuala Maras	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	Jemaja Timur	CP	PP	PP	PPI	PPI
116	711.21.08	Kiabu	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	Siantan Selatan	CP	PP	PP	PPI	PPI
117	711.21.09	Tarempa	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	Siantan	PPI	PPP	PPP	PPP	PPP
118	711.21.10	Tanjung Njang	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	Lingga Timur	CP	PP	PP	PPI	PPI
119	711.21.11	Dompak	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	Tanjung Pinang Kota	CP	PP	PP	PPI	PPI
120	712.36.01	Tanjung Pasir	Banten	Kab. Tangerang	Teluk Naga	CP	CP	PP	PP	PPI
121	712.36.02	Cituis	Banten	Kab. Tangerang	Paku Haji	PP	PPI	PPP	PPP	PPP
122	712.36.03	Kronjo	Banten	Kab. Tangerang	Kronjo	CP	CP	PP	PP	PPI
123	712.36.04	Lontar	Banten	Kab. Serang	Tirtayasa	CP	CP	PP	PP	PPI
124	712.36.05	Karangantu	Banten	Kota Serang	Kasemen	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
125	712.36.06	Terate	Banten	Kab. Serang	Kramatwatu	CP	CP	PP	PP	PPI
126	712.36.07	Wadas	Banten	Kab. Serang	Bojonegara	CP	CP	PP	PP	PPI
127	712.36.08	Pulokali	Banten	Kab. Serang	Pulo Ampel	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
128	572.36.09	Anyer	Banten	Kab. Serang	Anyer	CP	CP	PP	PP	PPI
129	572.36.10	Pasauran	Banten	Kab. Serang	Cinangka	CP	CP	PP	PP	PPI
130	572.36.11	Sukanagara	Banten	Kab. Pandeglang	Carita	CP	CP	PP	PP	PPI
131	572.36.12	Labuan	Banten	Kab. Pandeglang	Labuan	PPP	PPP	PPN	PPN	PPN
132	572.36.13	Sidamukti	Banten	Kab. Pandeglang	Sukaresmi	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
133	572.36.14	Panimbang	Banten	Kab. Pandeglang	Panimbang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
134	572.36.15	Sumur	Banten	Kab. Pandeglang	Sumur	CP	CP	PP	PP	PPI
135	572.36.16	Tamanjaya	Banten	Kab. Pandeglang	Sumur	CP	CP	PP	PP	PPI
136	573.36.17	Cikeusik	Banten	Kab. Pandeglang	Cikeusik	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
137	573.36.18	Binuangen	Banten	Kab. Lebak	Wanasalam	PP	PPI	PPP	PPN	PPS
138	573.36.19	Banten Selatan	Banten	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak	Cikeusik dan Wanasalam	CP	PP	PPI	PPP	PPN

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/ PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021- 2025	2026- 2030	2031- 2035	2036- 2040
139	573.36.20	Cirendeu	Banten	Kab. Lebak	Cilograng	CP	PP	PPI	PPI	PPI
140	712.31.01	Muara Angke	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara	Penjaringan	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
141	712.31.02	Nizam Zachman Jakarta	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara	Penjaringan	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
142	712.31.03	Kamal Muara	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara	Penjaringan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
143	712.31.04	Cilincing	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara	Cilincing	PP	PP	PP	PPI	PPI
144	712.31.05	Kalibaru	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara	Cilincing	PP	PP	PP	PPI	PPI
145	712.31.06	Kalibaru Cilincing Marunda (KCM)	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara	Cilincing	CP	PP	PPP	PPP	PPP
146	712.31.07	Pulau Pramuka	DKI Jakarta	Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	CP	PP	PP	PPI	PPI
147	712.32.01	Pal jaya	Jawa Barat	Kab. Bekasi	Tarumajaya	PP	PP	PP	PP	PPI
148	712.32.02	Sungai buntu	Jawa Barat	Kab. Karawang	Pedas	PP	PP	PP	PP	PPI
149	712.32.03	Pasir putih	Jawa Barat	Kab. Karawang	Cilamaya Kulon	PP	PP	PP	PP	PPI
150	712.32.04	Ciparage	Jawa Barat	Kab. Karawang	Tempura	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
151	712.32.05	Pakisjaya	Jawa Barat	Kab. Karawang	Pakis	PP	PP	PP	PP	PPI
152	712.32.06	Muara ciasem	Jawa Barat	Kab. Subang	Blanakan	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
153	712.32.07	Blanakan	Jawa Barat	Kab. Subang	Blanakan	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
154	712.32.08	Sukahaji (bugel)	Jawa Barat	Kab. Indramayu	Patrol	PP	PP	PP	PP	PPI
155	712.32.09	Karangsong	Jawa Barat	Kab. Indramayu	Indramayu	PP	PP	PP	PP	PPI
156	712.32.10	Pabean Udik	Jawa Barat	Kab. Indramayu	Indramayu	PP	PP	PP	PP	PPI
157	712.32.11	Juntinyuat (Glayem)	Jawa Barat	Kab. Indramayu	Indramayu	PP	PP	PP	PP	PPI
158	712.32.12	Eretan	Jawa Barat	Kab. Indramayu	Kandanghaur	PPP	PP	PP	PP	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
159	712.32.13	Dadap	Jawa Barat	Kab. Indramayu	Juntinyuat	PP	PP	PP	PP	PPI
160	712.32.14	Tegal agung	Jawa Barat	Kab. Indramayu	Karangampel	PP	PP	PP	PP	PPI
161	712.32.15	Majakerta	Jawa Barat	Kab. Indramayu	Indramayu	PP	PP	PP	PP	PPI
162	712.32.16	Pesisir	Jawa Barat	Kota Cirebon	Lemah Wungkuk	CP	CP	PP	PP	PPI
163	712.32.17	Kejawanan	Jawa Barat	Kota Cirebon	Lemah Wungkuk	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
164	712.32.18	Kasenden	Jawa Barat	Kota Cirebon	Kejaksan	CP	CP	CP	CP	PP
165	712.32.19	Bungko lor	Jawa Barat	Kab. Cirebon	Kapetakan	PP	PP	PP	PP	PPI
166	712.32.20	Karang reja	Jawa Barat	Kab. Cirebon	Suranenggala	PP	PP	PP	PP	PPI
167	712.32.21	Bondet	Jawa Barat	Kab. Cirebon	Gunungjati	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
168	712.32.22	Selopenganten (Bandengan-Citemu)	Jawa Barat	Kab. Cirebon	Mundu	PP	PP	PP	PP	PPI
169	712.32.23	Ender	Jawa Barat	Kab. Cirebon	Pangenan	PP	PP	PP	PP	PPI
170	712.32.24	Gebang mekar	Jawa Barat	Kab. Cirebon	Gebang	PP	PP	PP	PP	PPI
171	573.32.25	Cibangban	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	Cisolok	CP	CP	CP	CP	PP
172	573.32.26	Cisolok	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	Cisolok	PP	PP	PP	PP	PPI
173	573.32.27	Ciwaru	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	Ciemas	CP	CP	CP	CP	PP
174	573.32.28	Mina jaya	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	Surade	CP	CP	CP	CP	PP
175	573.32.29	Palabuhanratu	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	Pelabuhan Ratu	PPN	PPN	PPN	PPS	PPS
176	573.32.30	Ujung genteng	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	Ciracap	PP	PP	PP	PP	PPI
177	573.32.31	Jayanti	Jawa Barat	Kab. Cianjur	Cidaun	PP	PP	PP	PP	PPI
178	573.32.32	Cijeruk	Jawa Barat	Kab. Garut	Cibalong	CP	CP	CP	CP	PP
179	573.32.33	Cilauteureun	Jawa Barat	Kab. Garut	Cikelet	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
180	573.32.34	Cimari muara	Jawa Barat	Kab. Garut	Pakenjeng	CP	CP	CP	CP	PPI
181	573.32.35	Ranca buaya	Jawa Barat	Kab. Garut	Caringin	CP	CP	CP	CP	PPI
182	573.32.36	Nusa cimanuk	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	Cikalong	CP	CP	CP	CP	PPI
183	573.32.37	Pamayang Sari	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	Cipatujah	PP	PP	PP	PP	PPI
184	573.32.38	Batukaras	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	Cijulang	CP	CP	CP	CP	PP
185	573.32.39	Nusa Wiru	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	Cijulang	PP	PP	PP	PP	PPI



NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
186	573.32.40	Cikidang	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	Pangandaran	PP	PPI	PPN	PPN	PPN
187	573.32.41	Bojong Salawe	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	Parigi	CP	CP	CP	CP	PP
188	573.32.42	Legok jawa	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	Cimerak	CP	CP	CP	CP	PP
189	573.32.43	Madasari	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	Cimerak	CP	CP	CP	CP	PP
190	573.32.44	Muara Gatah	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	Cimerak	CP	CP	CP	CP	PP
191	573.32.45	Majingklak	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	Kalipucang	PP	PP	PP	PP	PPI
192	573.32.46	Plataragung	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	Kalipucang	CP	CP	CP	CP	PP
193	712.33.01	Kaliwlingi	Jawa Tengah	Kab. Brebes	Brebes	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
194	712.33.02	Kluwut	Jawa Tengah	Kab. Brebes	Bulakamba	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
195	712.33.03	Krakahan	Jawa Tengah	Kab. Brebes	Tanjung	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
196	712.33.04	Prapag Kidul	Jawa Tengah	Kab. Brebes	Losari	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
197	712.33.05	Pulolampes	Jawa Tengah	Kab. Brebes	Bulakamba	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
198	712.33.06	Pengaradan	Jawa Tengah	Kab. Brebes	Tanjung	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
199	712.33.07	Sawojajar	Jawa Tengah	Kab. Brebes	Wanasari	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
200	712.33.08	Karangdempel	Jawa Tengah	Kab. Brebes	Losari	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
201	712.33.09	Larangan	Jawa Tengah	Kab. Tegal	Kramat	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
202	712.33.10	Surodadi	Jawa Tengah	Kab. Tegal	Suradadi	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
203	712.33.11	Tegalsari	Jawa Tengah	Kota Tegal	Tegal Barat	PPP	PPN	PPN	PPN	PPN
204	712.33.12	Asemdayong	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	Taman	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
205	712.33.13	Mojo	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	Ulujami	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
206	712.33.14	Tanjungsari	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	Pemalang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
207	712.33.15	Nyemplungsari	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	Petarukan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
208	712.33.16	Jambean	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	Wonokerto	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
209	712.33.17	Wonokerto	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	Wonokerto	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
210	712.33.18	Pekalongan	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Pekalongan Utara	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
211	712.33.19	Celong	Jawa Tengah	Kab. Batang	Banyu Putih	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
212	712.33.20	Klidang Lor	Jawa Tengah	Kab. Batang	Batang	PPP	PPP	PPN	PPN	PPN
213	712.33.21	Roban	Jawa Tengah	Kab. Batang	Tulis	PP	PPI	PPI	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
214	712.33.22	Seklayu	Jawa Tengah	Kab. Batang	Gringsing	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
215	712.33.23	Bandengan	Jawa Tengah	Kab. Kendal	Kendal	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
216	712.33.24	Sendang Sikucing	Jawa Tengah	Kab. Kendal	Rowosari	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
217	712.33.25	Tawang	Jawa Tengah	Kab. Kendal	Rowosari	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
218	712.33.26	Tambak Lorok	Jawa Tengah	Kota Semarang	Semarang Utara	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
219	712.33.27	Mangunharjo	Jawa Tengah	Kota Semarang	Tugu	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
220	712.33.28	Wedung	Jawa Tengah	Kab. Demak	Wedung	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
221	712.33.29	Morodemak	Jawa Tengah	Kab. Demak	Purworejo	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
222	712.33.30	Bandungharjo	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Donorojo	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
223	712.33.31	Bondo	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Bangsri	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
224	712.33.32	Bulu	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Jepara	PPP	PPI	PPI	PPI	PPI
225	712.33.33	Demaan	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Jepara	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
226	712.33.34	Karimunjawa	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Karimunjawa	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
227	712.33.35	Kedungmalang	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Kedung	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
228	712.33.36	Mlonggo	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Mlonggo	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
229	712.33.37	Panggung	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Kedung	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
230	712.33.38	Ujung Batu	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Jepara	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
231	712.33.39	Ujung Watu	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Donorojo	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
232	712.33.40	Tubanan	Jawa Tengah	Kab. Jepara	Kembang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
233	712.33.41	Bajomulyo	Jawa Tengah	Kab. Pati	Juwana	PPP	PPP	PPN	PPN	PPN
234	712.33.42	Banyutowo	Jawa Tengah	Kab. Pati	Dukuh seti	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
235	712.33.43	Karanganyar	Jawa Tengah	Kab. Rembang	Kragan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
236	712.33.44	Pandangan	Jawa Tengah	Kab. Rembang	Kragan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
237	712.33.45	Pangkalan	Jawa Tengah	Kab. Rembang	Sluke	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
238	712.33.46	Sarang	Jawa Tengah	Kab. Rembang	Sarang	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
239	712.33.47	Tanjung Sari	Jawa Tengah	Kab. Rembang	Rembang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
240	712.33.48	Tasik Agung	Jawa Tengah	Kab. Rembang	Rembang	PPP	PPP	PPN	PPN	PPN
241	712.33.49	Binangun	Jawa Tengah	Kab. Rembang	Lasem	PP	PPI	PPI	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
242	712.33.50	Karanglincak	Jawa Tengah	Kab. Rembang	Kragan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
243	712.33.51	Pasar Banggi	Jawa Tengah	Kab. Rembang	Rembang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
244	712.33.52	Tunggulsari	Jawa Tengah	Kab. Rembang	Kaliori	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
245	573.33.53	Tegalkatilayu	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Cilacap Selatan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
246	573.33.54	Mengantikisik	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Kesugihan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
247	573.33.55	Cilacap	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Cilacap Selatan	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
248	573.33.56	Jetis	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Nusawungu	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
249	573.33.57	Kemiren	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Cilacap Selatan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
250	573.33.58	Lengkong	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Cilacap Utara	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
251	573.33.59	Sentolo Kawat	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Cilacap Selatan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
252	573.33.60	Karang Duwur	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	Ayah	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
253	573.33.61	Logending	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	Ayah	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
254	573.33.62	Pasir	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	Ayah	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
255	573.33.63	Tanggulagin	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	Klirong	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
256	573.33.64	Jati Kontal	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	Purwodadi	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
257	573.33.65	Keburuhan	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	Ngombol	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
258	573.33.66	Kertojayan	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	Grabag	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
259	573.33.67	Jatimalang	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	Purwodadi	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
260	573.34.01	Tanjung Adhikarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Wates	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
261	573.34.02	Sadeng	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Girisubo	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
262	573.34.03	Gesing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Panggung	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
263	712.35.01	Bulu	Jawa Timur	Kab. Tuban	Bancar	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
264	712.35.02	Karang Agung	Jawa Timur	Kab. Tuban	Palang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
265	712.35.03	Palang	Jawa Timur	Kab. Tuban	Palang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
266	712.35.04	Brondong	Jawa Timur	Kab. Lamongan	Paciran	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
267	712.35.05	Weru	Jawa Timur	Kab. Lamongan	Paciran	PP	PP	PPI	PPI	PPI
268	712.35.06	Bawean	Jawa Timur	Kab. Gresik	Sangkapura	PPI	PPP	PPP	PPP	PPP
269	712.35.07	Campurejo	Jawa Timur	Kab. Gresik	Panceng	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
270	712.35.08	Banyusangkah	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	Tanjung Bumi	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
271	712.35.09	Camplong	Jawa Timur	Kab. Sampang	Camplong	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
272	712.35.10	Ketapang	Jawa Timur	Kab. Sampang	Ketapang	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
273	712.35.11	Branta Pasisir	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	Tlanakan	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
274	712.35.12	Pasongsongan	Jawa Timur	Kab. Sumenep	Pasongsongan	PPI	PPP	PPP	PPP	PPP
275	712.35.13	Lekok	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	Lekok	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
276	712.35.14	Ngemplakrejo	Jawa Timur	Kota Pasuruan	Purworejo	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
277	712.35.15	Mayangan	Jawa Timur	Kota Probolinggo	Mayangan	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
278	712.35.16	Paiton	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Paiton	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
279	712.35.17	Randu Putih	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Dringu	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
280	712.35.18	Besuki	Jawa Timur	Kab. Situbondo	Besuki	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
281	712.35.19	Panarukan	Jawa Timur	Kab. Situbondo	Panarukan	PP	PP	PPI	PPI	PPI
282	712.35.20	Pondok Mimbo	Jawa Timur	Kab. Situbondo	Banyuputih	PP	PP	PPI	PPI	PPI
283	573.35.21	Grajagan	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	Purwoharjo	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
284	573.35.22	Muncar	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	Muncar	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
285	573.35.23	Pancer	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	Pesanggaran	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
286	573.35.24	Puger	Jawa Timur	Kab. Jember	Puger	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
287	573.35.25	Watu Ulo	Jawa Timur	Kab. Jember	Watu Ulo	CP	PP	PPI	PPI	PPI
288	573.35.26	Tegalrejo	Jawa Timur	Kab. Lumajang	Tempursari	CP	PP	PPI	PPI	PPI
289	573.35.27	Pondok Dadap	Jawa Timur	Kab. Malang	Sumbermanjing Wetan	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
290	573.35.28	Tambakrejo	Jawa Timur	Kab. Blitar	Wonotirto	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
291	573.35.29	Popoh	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	Besuki	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
292	573.35.30	Sine	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	Kalidawir	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
293	573.35.31	Prigi	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	Watulimo	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
294	573.35.32	Tamperan	Jawa Timur	Kab. Pacitan	Pacitan	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
295	573.35.33	Tawang Pacitan	Jawa Timur	Kab. Pacitan	Ngadirojo	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
296	713.51.01	Sangsit	Bali	Kab. Buleleng	Sawan	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
297	713.51.02	Amed	Bali	Kab. Karangasem	Abang	CP	PP	PP	PPI	PPI
298	573.51.03	Batu Nunggul	Bali	Kab. Klungkung	Nusa Penida	CP	PP	PP	PPI	PPI
299	573.51.04	Kusamba	Bali	Kab. Klungkung	Dawan	CP	PP	PP	PPI	PPI
300	573.51.05	Serangan	Bali	Kota Denpasar	Denpasar Selatan	CP	PP	PP	PPI	PPI
301	573.51.06	Kedonganan	Bali	Kab. Badung	Kuta	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
302	573.51.07	Tanjung Benoa	Bali	Kab. Badung	Kuta Selatan	CP	PP	PP	PPI	PPI
303	573.51.08	Air Kuning	Bali	Kab. Jembrana	Mendoyo	CP	PP	PP	PP	PPI
304	573.51.09	Yeh Sumbul	Bali	Kab. Jembrana	Mendoyo	CP	PP	PP	PP	PPI
305	573.51.10	Pengambengan	Bali	Kab. Jembrana	Jembrana	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
306	713.52.01	Teluk Santong	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	Plampang	PPI	PPP	PPP	PPP	PPP
307	573.52.02	Teluk Awang	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	Pujut	PP	PPP	PPP	PPN	PPN
308	573.52.03	Labuhan Lombok	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	Pringgabaya	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
309	573.52.04	Tanjung Luar	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	Keruak	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
310	573.52.05	Sape	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	Sape	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
311	713.52.06	Soro Kempo	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	Kempo	PP	PP	PPI	PPI	PPP
312	713.53.01	Labuhan Bajo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	Komodo	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
313	713.53.02	Reo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	Reok	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
314	713.53.03	Nangamese	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	Riung	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
315	714.53.04	Aimere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	Aimere	CP	PPI	PPI	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/ PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
316	713.53.05	Konge	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	Aesesa	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
317	713.53.06	Nangadhero	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	Aisesa	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
318	713.53.07	Alok	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	Alok	PP	PPI	PPI	PPP	PPN
319	573.53.08	Paga	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	Paga	CP	PP	PP	PPI	PPI
320	714.53.09	Amagarapati	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	Larantuka	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
321	714.53.10	Adonara	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	Adonara	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
322	714.53.11	Rita Ebang	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	Solor Barat	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
323	573.53.12	Hukung Lewoleba	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lewoleba	Nubatukan	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
324	573.53.13	Pulau Ende	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	Pulau Ende	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
325	573.53.14	Paupanda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	Ende Selatan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
326	573.53.15	Kalabahi	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	Teluk Mutiara	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
327	573.53.16	Kenarilang	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	Alor Timur	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
328	573.53.17	Atapupu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	Kakuluk Mezak	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
329	573.53.18	Tenau	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Alak	PP	PPP	PPN	PPN	PPN
330	573.53.19	Oeba	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Kota Lama	PP	PPP	PPP	PPP	PPP
331	573.53.20	Bolok	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	Kupang Barat	CP	PP	PPI	PPP	PPP

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
332	573.53.21	Bitan	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	Kolbano	CP	PP	PP	PPI	PPI
333	573.53.22	Wini	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	Insana Utara	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
334	573.53.23	Mamboro	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	Mamboro	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
335	573.53.24	Katewel	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	Loura	CP	PP	PP	PPI	PPI
336	573.53.25	Pero	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	Kodi	CP	PP	PP	PPI	PPI
337	573.53.26	Wanokaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	Wanokaka	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
338	573.53.27	Waingapu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	Kota Waingapu	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
339	573.53.28	Tulandale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	Lobalain	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
340	573.53.29	Ledeana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	Sabu Barat	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
341	711.61.01	Pemangkat	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	Pemangkat	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
342	711.61.02	Selakau	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	Selakau	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
343	711.61.03	Kuala Singkawang	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	Singkawang Barat	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
344	711.61.04	Sungai Duri	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	Sungai Kunyit	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
345	711.61.05	Kuala Mempawah	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	Mempawah Timur	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
346	711.61.06	Sungai Rengas	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Pontianak Barat	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
347	711.61.07	Sungai Jawi	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Pontianak Barat	PP	PPI	PPI	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
348	711.61.08	Sukadana	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	Sukadana	PP	PP	PP	PPI	PPI
349	711.61.09	Tanjung Satai	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	Pulau Maya Karimata	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
350	711.61.10	Teluk Batang	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	Teluk Batang	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
351	711.61.11	Suka Bangun	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	Delta Pawan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
352	711.61.12	Sungai Kakap	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	Sungai Kakap	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
353	712.62.01	Kuala Jelai	Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	Jelai	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
354	712.62.02	Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
355	712.62.03	Kumai	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	Kumai	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
356	712.62.04	Sei Ijum	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Selatan	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
357	712.62.05	Ujung Pandaran	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	Teluk Sampit	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
358	712.62.06	Selat Jeruju	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	Katingan Kuala	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
359	712.62.07	Bahaur	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	Kahayan Kuala	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
360	712.62.08	Batanjung	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	Kuala Kapuas	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
361	712.62.09	Pasar Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
362	712.63.01	Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Banjarmasin Barat	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI



NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
363	712.63.02	Aluh aluh	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	Aluh - aluh	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
364	712.63.03	Swarangan	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	Jorong	PP	PP	PP	PPI	PPI
365	712.63.04	Muara Kintap	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	Muara Kintap	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
366	712.63.05	Batulicin	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	Simpang Empat	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
367	712.63.06	Kotabaru	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
368	712.63.07	Teluk Tamiang	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	Teluk Tamiang	PP	PP	PP	PPI	PPI
369	713.64.01	Api-Api	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	Waru	CP	CP	CP	PPI	PPI
370	713.64.02	Manggar Baru	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
371	713.64.03	Selili	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Samarinda illir	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
372	713.64.04	Sambaliung	Kalimantan Timur	Kab. Berau	Sambaliung	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
373	713.64.05	Tanjung Limau	Kalimantan Timur	Kota Bontang	Bontang Utara	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
374	713.64.06	Sangatta	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	Sangatta Utara	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
375	716.65.01	Bunyu	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	Bunyu	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
376	716.65.02	Tengkayu II	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Tarakan Barat	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
377	716.65.03	Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Tarakan	CP	PP	PP	PP	PP
378	716.65.04	Mansapa	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	CP	PP	PP	PP	PP

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
379	716.65.05	Yamaker	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	Nunukan	CP	PP	PP	PP	PP
380	716.65.06	Sebatik	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	Sebatik utara	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
381	713.73.01	Bone-Bone	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	Tanalili	CP	PP	PP	PPI	PPI
382	713.73.02	Malangke	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	Malangke	CP	PP	PP	PPI	PPI
383	713.73.03	Balambang	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	Bua	PP	PPI	PPP	PPP	PPP
384	713.73.04	Bonepute	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	Larompong Selatan	CP	PP	PP	PPI	PPI
385	713.73.05	Ulo-Ulo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	Belopa	PP	PPI	PPP	PPP	PPN
386	713.73.06	Pontap	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	Wara Timur	PP	PPI	PPP	PPP	PPN
387	713.73.07	Cendanae	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	Keera	CP	PP	PP	PPI	PPI
388	713.73.08	Botto	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	Bola	CP	PP	PP	PPI	PPI
389	713.73.09	Lonrae	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	Tanete Riattang	PP	PPI	PPP	PPN	PPN
390	713.73.10	Kajuara	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	Kajuara	CP	PP	PP	PPI	PPI
391	713.73.11	Cenrana	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	Cenrana	CP	PP	PP	PPI	PPI
392	713.73.12	Tongke-Tongke	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	Sinjai Timur	CP	PP	PP	PPI	PPI
393	713.73.13	Lappa	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	Sinjai Utara	PP	PPI	PPP	PPN	PPN
394	713.73.14	Bonto Bahari Bulukumba	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	Bontobahari	PP	PPI	PPP	PPN	PPN
395	713.73.15	Bintarore	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	Gantarang	CP	PP	PP	PPI	PPI
396	713.73.16	Herlang	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	Herlang	CP	PP	PP	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
397	713.73.17	Bajange	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	Herlang	CP	PP	PP	PPI	PPI
398	713.73.18	Panrang Luhu	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	Bontobahari	CP	PP	PP	PPI	PPI
399	713.73.19	Bentengnge	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	Ujung Bulu	CP	PP	PP	PPI	PPI
400	713.73.20	Parapara	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	Bontotiro	CP	PP	PP	PPI	PPI
401	713.73.21	Kajang	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	Kajang	PP	PPI	PPI	PPP	PPN
402	713.73.22	Birea	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	Pa'jukukang	PPI	PPI	PPP	PPP	PPN
403	713.73.23	Tanga-Tanga	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	Bissappu	CP	PP	PP	PPI	PPI
404	713.73.24	Tanrusampe	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	Binamu	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
405	713.73.25	Pabbiringan	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	Bangkala	CP	PP	PP	PPI	PPI
406	713.73.26	Jeneponto	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	Batang	CP	PP	PP	PPI	PPI
407	713.73.27	Beba	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	Galesong Utara	PP	PPI	PPP	PPN	PPN
408	713.73.28	Je'ne	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	Mangara Bombang	CP	PP	PP	PPI	PPI
409	713.73.29	Lamangkia	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	Mangara Bombang	CP	PP	PP	PPI	PPI
410	713.73.30	Boddia	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	Galesong	CP	PP	PP	PPI	PPI
411	713.73.31	Soreang	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	Mappakas unggu	CP	PP	PP	PPI	PPI
412	713.73.32	Mangindara	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	Sanrobone	CP	PP	PP	PPI	PPI
413	713.73.33	Borombong	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	Barombong	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
414	713.73.34	Paotere	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Ujung Tanah	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
415	713.73.35	Untia	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Biringkanaya	PP	PPI	PPP	PPN	PPS

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
416	713.73.36	Bonto Bahari Maros	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	Bonto Bahari	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
417	713.73.37	Maccinibaji	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Labakkang	PP	PPI	PPP	PPP	PPP
418	713.73.38	Bawasalo	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Ma'rang	CP	PP	PP	PPI	PPI
419	713.73.39	Bonto Bahari Pangkep	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Ma'rang	CP	PP	PP	PPI	PPI
420	713.73.40	Polejiwa	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	Tanete Rilau	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
421	713.73.41	Sumpang Binangae	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	Barru	CP	PP	PP	PPI	PPI
422	713.73.42	Kupa	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	Mallusettasi	CP	PP	PP	PPI	PPI
423	713.73.43	Cempae	Sulawesi Selatan	Kota Parepare	Sumpang Minangae	PP	PPI	PPP	PPP	PPN
424	713.73.44	Siddo	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	Soppeng Riaja	CP	PP	PP	PPI	PPI
425	713.73.45	Lero	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	Suppa	PP	PPI	PPI	PPI	PPP
426	713.73.46	Pajalele	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	Lembang	CP	PP	PP	PPI	PPI
427	713.73.47	Bonehalang	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	Benteng	PPI	PPI	PPP	PPP	PPN
428	713.76.01	Lantora	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	Polewali	PP	PPI	PPN	PPN	PPN
429	713.76.02	Palipi	Sulawesi Barat	Kab. Majene	Sendana	PPI	PPI	PPN	PPN	PPN
430	713.76.03	Banggae	Sulawesi Barat	Kab. Majene	Banggae	PP	PPP	PPP	PPP	PPN
431	713.76.04	Kasiwa	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	Mamuju	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
432	713.76.05	Babana	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	Budong-budong	CP	PP	PP	PPI	PPI
433	713.76.06	Pasangkayu	Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	Pasangkayu	CP	PP	PP	PPI	PPI
434	714.74.01	Kendari	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Abeli	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
435	714.74.02	Sodohoa	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Kendari Barat	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/ PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
436	714.74.03	Lasolo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe utara	Lasolo	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
437	714.74.04	Sawa	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	Sawa	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
438	714.74.05	Molawe	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	Molawe	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
439	714.74.06	Soropia	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	Soropia	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
440	714.74.07	Langara	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	Wawonii Barat	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
441	714.74.08	Torobulu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	Laeya	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
442	714.74.09	Tinanggea	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	Tinanggea	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
443	714.74.10	Boepinang	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	Poleang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
444	714.74.11	Poleang	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	Poleang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
445	714.74.12	Sikeli	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	Kabaena Barat	CP	PP	PPI	PPI	PPI
446	714.74.13	Rumbia Tengah	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	Rumbia Tengah	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
447	714.74.14	Wameo	Sulawesi Tenggara	Kota Bau-bau	Murhum	PP	PPI	PPI	PPN	PPN
448	714.74.15	Minaminanga	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	Kulisusu	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
449	714.74.16	Pasarwajo	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	Pasarwajo	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
450	714.74.17	Kamaru	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	Lasalimu	PP	PPI	PPI	PPN	PPN
451	714.74.18	Sampolawa	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	Sampolawa	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
452	714.74.19	Laino	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	Bata Laiworu	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
453	714.74.20	Tondasi	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	Tiworo Utara	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
454	714.74.21	Numana	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	Wangi - wangi Selatan	CP	PP	PPI	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/ PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
455	713.74.22	Anaiwoi	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	Tangetada	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
456	713.74.23	Dawi-dawi	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	Pomalaa	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
457	713.74.24	Mangolo	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	Latambaga	PP	PPI	PPI	PPN	PPN
458	713.74.25	Pitulua	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	Lasusua	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
459	713.74.26	Sipakainge	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	Pakue	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
460	716.72.01	Diapati	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	Gadung	CP	PP	PP	PPI	PPI
461	716.72.02	Kuala Besar	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	Paleleh	CP	PP	PP	PPI	PPI
462	716.72.03	Labuton	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	Gadung	CP	PP	PP	PPI	PPI
463	716.72.04	Ogotua	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	Dampal Utara	PPP	PPP	PPP	PPP	PPN
464	713.72.05	Batusuya	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	Sindue Tambu	CP	PP	PP	PPI	PPI
465	713.72.06	Pangalaseang	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	Sojol	CP	PP	PP	PPI	PPI
466	713.72.07	Donggala	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	Banawa	PPI	PPI	PPI	PPP	PPN
467	713.72.08	Taipa Palu	Sulawesi Tengah	Kota Palu	Palu Utara	CP	PP	PP	PPI	PPI
468	715.72.09	Bayantogo	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	Parigi Selatan	CP	PP	PP	PPI	PPI
469	715.72.10	Ongka	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	Ongka Malino	CP	PP	PP	PPI	PPI
470	715.72.11	Sigenti	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	Tinombo Selatan	CP	PP	PP	PPI	PPI
471	715.72.12	Paranggi	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	Ampibabo	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
472	715.72.13	Gebang Rejo	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	Poso Kota	PP	PP	PP	PPI	PPI
473	715.72.14	Ampana	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	Ampana Kota	CP	PP	PP	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
474	715.72.15	Bahari	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	Tojo Barat	CP	PP	PP	PPI	PPI
475	715.72.16	Malenge	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	Talatako	PP	PP	PP	PPI	PPI
476	714.72.17	Pagimana	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	Pagimana	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
477	714.72.18	Salakan	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	Tinangkung	CP	PP	PPI	PPI	PPI
478	714.72.19	Balantak	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	Balantak	CP	PP	PP	PPI	PPI
479	714.72.20	Bonebakal	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	Lamala	CP	PP	PP	PPI	PPI
480	714.72.21	Bualemo	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	Bualemo	CP	PP	PP	PPI	PPI
481	714.72.22	Bunta	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	Bunta	CP	PP	PP	PPI	PPI
482	714.72.23	Toili	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	Toili Barat	CP	PP	PP	PPI	PPI
483	714.72.24	Mantop	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	Bulagi Utara	CP	PP	PP	PPI	PPI
484	714.72.25	Mato	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	Banggai Tengah	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
485	714.72.26	Kolonodale	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	Petasia	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
486	714.72.27	Lafeu	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	Bungku Pesisir	CP	PP	PPI	PPI	PPI
487	714.72.28	Baturube	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	Bungku Utara	CP	PP	PP	PPI	PPI
488	714.72.29	Bente	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	Bungku Tengah	CP	PP	PP	PPI	PPI
489	714.72.30	Sambalangi	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	Bungku Selatan	CP	PP	PP	PPI	PPI
490	714.72.31	Ulunambo	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	Menui Kepulauan	CP	PP	PP	PPI	PPI
491	716.75.01	Kwandang	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Kwandang	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
492	716.75.02	Gentuma	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Gentuma Raya	PPI	PPI	PPI	PPN	PPN

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
493	715.75.03	Inengo	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	Kabila Bone	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
494	715.75.04	Tongo	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	Bonepantai	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
495	715.75.05	Tenda	Gorontalo	Kota Gorontalo	Hulonthalangi	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
496	715.75.06	Tilamuta	Gorontalo	Kab. Boalemo	Tilamuta	PPI	PPI	PPI	PPP	PPP
497	715.75.07	Wonggarasi Timur	Gorontalo	Kab. Pohuwato	Wonggarasi	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
498	715.71.01	Bitung	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Aertembaga	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
499	715.71.02	Atep Oki	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	Lambean Timur	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
500	715.71.03	Dodepo	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Molibagu	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
501	715.71.04	Belang	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	Belang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
502	715.71.05	Jiko	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Nuangan	CP	PP	PP	PPI	PPI
503	716.71.06	Tanjung Sidupa	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Pinogaluman	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
504	716.71.07	Tumumpa	Sulawesi Utara	Kota Manado	Tuminting	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
505	716.71.08	Calaca	Sulawesi Utara	Kota Manado	Wenang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
506	716.71.09	Kema	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	Kema	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
507	716.71.10	Likupang	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	Likupang Timur	PP	PPI	PPP	PPN	PPS
508	716.71.11	Amurang	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	Amurang	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
509	716.71.12	Sauk	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	Lolak	CP	PP	PP	PPI	PPI
510	716.71.13	Ulu	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Ulu Siau	Siau Timur	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
511	716.71.14	Dagho	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	Tamako	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
512	716.71.15	Salibabu	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	Salibabu	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
513	715.13.01	Tiley	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	Morotai Selatan	PP	PPI	PPP	PPN	PPS
514	715.13.02	Daero Majiko	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	Morotai Selatan	PP	PPI	PPP	PPP	PPP



NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
515	715.13.03	Tobelo	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	Tobelo Tengah	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
516	715.13.04	Tuada	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	Jailolo	PP	PPI	PPP	PPP	PPP
517	715.13.05	Manitinting	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	Maba	PP	PPI	PPP	PPN	PPS
518	715.13.06	Ternate	Maluku Utara	Kota Ternate	Ternate Selatan	PPN	PPN	PPN	PPN	PPS
519	715.13.07	Goto	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Tidore	PP	PPI	PPP	PPP	PPP
520	715.13.08	Dufa-Dufa	Maluku Utara	Kota Ternate	Ternate Utara	PP	PPI	PPP	PPP	PPP
521	715.13.09	Weda	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	Weda	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
522	715.13.10	Gebe	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	Pulau Gebe	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
523	715.13.11	Bacan	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	Bacan Selatan	PPP	PPP	PPN	PPS	PPS
524	715.13.12	Sayoang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	Bacan Timur	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
525	715.13.13	Wainin	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	Sanana Utara	PP	PPI	PPP	PPN	PPS
526	715.81.01	Waiyoho	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	Seram Barat	CP	PP	PP	PPI	PPI
527	715.81.02	Piru	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	Seram Barat	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
528	714.81.03	Masarete	Maluku	Kab. Buru	Teluk Kayeli	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
529	714.81.04	Banda	Maluku	Kab. Maluku Tengah	Pulau Banda	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI
530	714.81.05	Masohi	Maluku	Kab. Maluku Tengah	Amahai	CP	PP	PP	PPI	PPI
531	714.81.06	Tulehu	Maluku	Kab. Maluku Tengah	Salahuttu	CP	PP	PP	PPI	PPI
532	714.81.07	Pelabuhan Perikanan Terintegrasi	Maluku	Kab. Maluku Tengah	Salahuttu	CP	PP	PPI	PPN	PPS
533	714.81.08	Ambon	Maluku	Kota Ambon	Sirimau	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
534	714.81.09	Eri	Maluku	Kota Ambon	Nusaniwe	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
535	714.81.10	Ukurlaran	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	Tanimbar Selatan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
536	714.81.11	Tamher Timur	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	Wakate	PP	PPI	PPI	PPI	PPI

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
537	714.81.12	Tiakur	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	Moa Lakor	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
538	714.81.13	Wetar	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	Wetar	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
539	714.81.14	Tual	Maluku	Kota Tual	Dullah Selatan	PPN	PPN	PPN	PPN	PPN
540	714.81.15	UF	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	Kei Kecil Selatan	CP	PP	PPI	PPP	PPP
541	714.81.16	Elat	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	Kei Besar	CP	PP	PP	PPI	PPI
542	714.81.17	Weduar	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	Kei Besar Selatan	CP	PP	PP	PPI	PPI
543	714.81.18	Masnana	Maluku	Kab. Buru Selatan	Namrole	CP	PP	PP	PPI	PPI
544	714.81.19	Batu Tulis	Maluku	Kab. Buru Selatan	Namrole	CP	PP	PP	PPI	PPI
545	714.81.20	Fogi	Maluku	Kab. Buru Selatan	Kepala Madan	CP	PP	PP	PPI	PPI
546	714.81.21	Wamsisi	Maluku	Kab. Buru Selatan	Waesama	CP	PP	PP	PPI	PPI
547	714.81.22	Kelfik Taar	Maluku	Kota Tual	Dullah Selatan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
548	714.81.23	Ohoi Faan Sathean	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	Kei Kecil Timur Selatan	CP	PP	PP	PPI	PPI
549	714.81.24	Selayar	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	Manyeuw	CP	PP	PP	PPI	PPI
550	718.81.25	Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	Pulau-Pulau Aru	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
551	718.81.26	Kalar Kalar	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	Aru Selatan	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
552	715.13.01	Sanggeng	Papua Barat	Kab. Manokwari	Manokwari Barat	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
553	715.13.02	Sorong	Papua Barat	Kota Sorong	Sorong Kota	PPP	PPP	PPN	PPN	PPN
554	715.13.03	Klademak	Papua Barat	Kota Sorong	Sorong Manoi	PP	PPI	PPP	PPP	PPP
555	715.13.04	Katapop	Papua Barat	Kab. Sorong	Salawati	PP	PPI	PPP	PPP	PPP
556	715.13.05	Dulanpokpok	Papua Barat	Kab. Fak-fak	Pariwari	PP	PPI	PPP	PPP	PPP
557	715.13.06	Dotir	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	Wasior	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
558	715.13.07	Raipawi Abresso	Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan	Ransiki	CP	PP	PP	PPI	PPP
559	717.91.01	Fandoi	Papua	Kab. Biak Numfor	Biak Kota	PP	PPI	PPI	PPP	PPN
560	717.91.02	Wadibu	Papua	Kab. Biak Numfor	Oridek	CP	PPS	PPS	PPS	PPS
561	717.91.03	Samber	Papua	Kab. Biak Numfor	Yendidori	CP	PP	PPI	PPP	PPP
562	717.91.04	Hamadi	Papua	Kota Jayapura	Jayapura Selatan	PP	PPI	PPI	PPI	PPP

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/ PPP/PPI/ PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
563	717.91.05	Depapre	Papua	Kab. Jayapura	Depapre	PP	PPI	PPI	PPP	PPP
564	717.91.06	Sarafambai	Papua	Kab. Waropen	Waropen Bawah	PP	PPI	PPI	PPI	PPI
565	717.91.07	Waharia	Papua	Kab. Nabire	Samoba	PP	PPI	PPI	PPP	PPN
566	718.91.08	Poumako	Papua	Kab. Mimika	Mimika Timur	PP	PPI	PPI	PPP	PPN
567	718.91.09	Omor	Papua	Kab. Asmat	Agats	PP	PPI	PPI	PPP	PPN
568	718.91.10	Sumuraman	Papua	Kab. Mappi	Minyamur	CP	PPI	PPI	PPP	PPN
569	718.91.11	Kelapa Lima	Papua	Kab. Merauke	Merauke	CP	PP	PP	PPI	PPI
570	718.91.12	Merauke	Papua	Kab. Merauke	Merauke	PPN	PPN	PPS	PPS	PPS

Tabel 5. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Dibangun oleh Pemerintah dan Melayani Kapal Perikanan yang Melakukan Kegiatan Perikanan di Perairan Darat, dan Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PPS/PPN/PPP/PPI/PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	438.15.01	Mendalo Laut	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Jambi Luar Kota	CP	CP	CP	PPI	PPI
2	432.33.02	Rawalo	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	Rawalo	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
3	434.33.03	Wuryantoro	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	Wuryantoro	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
4	434.33.04	Rawapening	Jawa Tengah	Kab. Semarang	Tuntang	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
5	434.33.05	Sumberejo	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	Wadaslintang	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
6	434.33.06	Tritis	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	Wadaslintang	CP	PPI	PPI	PPI	PPI
7	434.33.07	Waduk Kedungombo	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	Geyer	CP	PPI	PPI	PPI	PPI

Tabel 6. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah dan Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Nama Perusahaan Saat Ini	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
				Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	711.21.12	Barelang	PT Mandra Guna Gema Sejati	Kepulauan Riau	Kota Batam	Bulang	PP	PP	PP	PP	PP
2	711.21.13	Telaga Punggur	PT Sarana Yeoman Sembada	Kepulauan Riau	Kota Batam	Nongsa	PP	PP	PP	PP	PP
3	712.32.47	Muara Gembong	PT Handi Jaya Internasional	Jawa Barat	Kab. Bekasi	Muara Gembong	CP	PP	PP	PP	PP
4	573.35.35	Masami	PT Pasifik Masami Indonesia	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	Panarukan	PP	PP	PP	PP	PP
5	572.36.21	Argawana	PT Harapan Teknik Shipyard	Banten	Kab. Serang	Pulo Ampel	CP	PP	PP	PP	PP
6	573.51.11	Jembrana	PT Lianinti Abadi	Bali	Kab. Jembrana	Jembrana	CP	PP	PP	PP	PP
7	714.81.27	Leihitu	PT Maluku Prima Sejahtera	Maluku	Kab. Maluku Tengah	Leihitu	CP	PP	PP	PP	PP
8	714.81.28	Salahutu	PT Aneka Sumber Tata Bahari	Maluku	Kab. Maluku Tengah	Salahutu	CP	PP	PP	PP	PP
9	718.81.29	Penambulai	PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	Aru Tengah Selatan	CP	PP	PP	PP	PP
10	718.81.30	Benjina	PT Industri Perikanan Arafura	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	Aru Tengah	CP	PP	PP	PP	PP
11	714.81.31	Tual	PT Samudera Indo Sejahtera	Maluku	Kota Tual	Dullah Utara	CP	PP	PP	PP	PP
12	718.91.13	Wanam	PT Dwikarya Reksa Abadi	Papua	Merauke	Wanam	CP	PP	PP	PP	PP

NO	Kode Pelabuhan Perikanan	Nama Pelabuhan Perikanan	Nama Perusahaan Saat Ini	Lokasi Pelabuhan Perikanan			Kondisi Saat Ini (PP/CP)	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
				Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
13	718.91.14	Biak	PT Famindo Bahari Indonesia	Papua	Biak Numfor	Yendidori	CP	PP	PP	PP	PP
14	715.92.08	Namatota	PT Industri Perikanan Namatota	Papua Barat	Kaimana	Wasior	CP	PP	PP	PP	PP
15	715.92.09	Avona	PT Avona Mina Lestari	Papua Barat	Kaimana	Teluk Etna	CP	PP	PP	PP	PP

D. Pembiayaan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan program perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan, pola penganggaran lebih diarahkan untuk berorientasi pada pemangku kepentingan dengan berbasis program kementerian/lembaga. Pelaksanaannya dilakukan melalui optimalisasi pembangunan fisik melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau dana lainnya, fokus penggunaan anggaran untuk operasional Pelabuhan Perikanan, efisien, dan efektif dalam penentuan kegiatan, serta dapat bersinergi antara Kementerian, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

BAB IV  
PENUTUP

RIPPN merupakan salah satu dasar pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan, yang mencakup kebijakan Pelabuhan Perikanan nasional dan rencana lokasi Pelabuhan Perikanan di seluruh wilayah Indonesia.

RIPPN sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

Tini Marani

